



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SOLOK

TESIS



LUSI ROSSALINNA

1021221017

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2012

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SOLOK

Oleh

LUSI ROSSALINNA

Master Science (M.Si) dalam Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas

Dibimbing oleh: Dr. Hefrizal Handra, M,Soc,Sc dan Dr.H.Masrizal,M.Soc,Sc

ABSTRAK

Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan Daerah. Kota Solok sebagai kota kecil yang miskin dengan Sumber Daya Alam mencoba menggali Potensi-potensi yang ada salah satunya Pengelolaan Retribusi Parkir. Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok pada awalnya dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan tujuan menekan biaya-biaya yang ditimbulkan, bahkan sampai terbitnya Perda Nomor 5 tahun 2008 pengelolaan parkir masih tetap dilaksanakan oleh pihak ketiga akan tetapi pelaksanaan retribusi seringkali tidak mencapai atau menurun dari target yang ditentukan. Pada tahun 2011 pengelolaan parkir ditepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan peningkatan pendapatan retribusi parkir yang cukup pesat. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan penelitian ini yakni menganalisis prosedur dan mekanisme serta menganalisis kinerja pengelolaan retribusi parkir sebelum dan sesudah dilaksanakan nya Perda nomor 5 tahun 2008.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yang mana analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan perekonomian retribusi parkir sedangkan analisa kuantitatif menghitung tingkat efisien dan efektifitas kinerja pengelolaan parkir ditepi jalan umum, serta analisa komparatif yakni membandingkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebelum dan setelah dilaksanakan perda.

Hasil penelitian pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum terdapat prosedur dan mekanisme pengelolaan yang berbeda saat di kelola oleh pihak ketiga dengan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, sedangkan tingkat kinerja pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat dikelola oleh pihak ketiga.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah salah satunya Retribusi Parkir, peningkatan retribusi parkir dengan melihat kinerja Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok**. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Akuntansi, pada Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin Karimi, SE, MA Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Hefrizal Handra, M.Soc, Sc dan Bapak Drs. H. Masrizal, M.Soc, Sc sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu dalam pelaksanaan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Andalas yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Drs. Mon Suhendra Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok yang banyak memberikan dukungan dan toleransinya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Staf Sekretariat Ibu Husnul Katimah (Buk Ima) dan Resti, yang telah membantu melancarkan semua proses yang harus dilewati.
8. Teman seperjuanganku Rikaverawati yang seiring sejalan Solok-Padang “makan lontong simp. Banda buek” semangat yah ver...
9. Teman-teman angkatan VII (tahun 2010) kelas Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran yang bermanfaat bagi perbaikan tesis ini.

Padang, 15 Oktober 2012
Hormat Penulis,


LUSI ROSSALINNA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Kajian Pustaka	7
2.1.1. Definisi Retribusi Daerah	7
2.1.2. Jenis-jenis Retribusi Daerah	8
2.1.3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.4. Dasar Hukum Retribusi Pengelolaan Parkir	14
2.1.5.. Pengelolaan Parkir	16
2.1.5.1. Sasaran Penyelenggara parkir	17
2.1.5.2. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	18
2.1.5.3. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Parkir	20
2.1.5.4. Tujuan Pengelolaan manajemen parkir	22
2.1.5.5. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Retribusi Parkir	23
2.2. Kriteria Retribusi Daerah	25
2.3. Perhitungan Penerimaan Retribusi Daerah (potensi parkir)	25
2.4. Telaah Peneliti sebelumnya	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	31
3.2. Data dan Sumber Data	32
3.3. Metode Penelitian	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah	37
4.2. Pertumbuhan Ekonomi	
4.3. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	44
4.4. Kontribusi Penerimaan Masing-masing PAD	47
4.5. Kemampuan Keuangan Daerah	49
4.6. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	54
4.7. Pengelolaan Retribusi Parkir dan Perkembangan Penerimaan	58
4.7.1. Pengelolaan Retribusi Parkir	58
Sistim dan Administrasi Pengelolaan Retribusi Parkir	58
1. Penetapan Tarif	58
2. Pendataan/Identifikasi	61
3. Penaksiran Retribusi	62
4. Penetapan Target	63
5. Pemungutan dan Pembayaran	64
6. Sistem Pencatatan dan Pelaporan	68
7. Pengawasan	68
8. Pemaksaan dan Penetapan Sanksi	69
9. Kemampuan SDM	69
4.7.2. Perkembangan Penerimaan	69
1. Potensi Retribusi Parkir	70
2. Perbandingan Retribusi Parkir	71
4.8. Analisa Pengelolaan Retribusi Parkir dan Perkembangan Retribusi Parkir Sebelum dan Sesudah diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008	73
4.9. Analisa Efisiensi dan Efektifitas	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	79
Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------	----

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 1.1	Laporan Penerimaan Hasil Pemungutan Retribusi Parkir Yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok	4
2.	Tabel 2.1	Daftar Hasil-hasil peneliti terdahulu	29
3.	Tabel 3.1	Formula efisiensi dan efektifitas	35
4.	Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha	42
5.	Tabel 4.2	Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok	45
6.	Tabel 4.3	Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Total PAD	47
7.	Tabel 4.4	Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Solok	51
8.	Tabel 4.5	Kontribusi Retribusi Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Terhadap Retribusi Di Kota Solok	51
9.	Tabel 4.6	Tarif Retribusi Parkir	58
10.	Tabel 4.7	Sabjek dan Objek Retribusi Parkir	60
11.	Tabel 4.8	Potensi Retribusi Parkir kendaraan	70
12.	Tabel 4.9	Perbandingan Pengelolaan Retribusi Parkir yang dilaksanakan dengan pihak ketiga dengan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan	71
13.	Tabel 4.10	Sistim dan Administrasi Pengelolaan Retribusi Parkir Sebelum dan setelah diterapkannya Perda	74
14.	Tabel 4.11	Persentase Efisiensi Pengelolaan Retribusi parkir	77
15.	Tabel 4.12	Tingkat Persentase Efektifitas Retribusi Parkir	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 4.1 Struktur Dinas Perhubungan Kominfo Kota Solok	55
2. Gambar 4.2 Alur penerimaan Retribusi Perparkiran yang dikelola oleh pihak ketiga	64
3. Gambar 4.3 Alur penerimaan Retribusi Perparkiran Setelah Penerapan Perda	66



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perhitungan Potensi Parkir	83
2. Perhitungan Efisien Retribusi Parkir	84
3. Perhitungan Efektifitas Retribusi Parkir	85
4. Daftar Wawancara	86
5. Perda Nomor 5 tahun 2008	87
6. Bukti Pendukung teguran tentang retribusi parkir	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Pemerintahan. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak dan retribusi untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan disegala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor Retribusi melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya.

Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan

dengan Retribusi Daerah, diantaranya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Parkir Khusus, dan Pajak Parkir. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam kaitanya dengan Peningkatan Retribusi, Kota Solok sebagai salah satu daerah kota kecil yang miskin sumber daya alam maka implikasi yang muncul atas lahirnya undang-undang tersebut adalah menggali secara maksimal sumber-sumber pendapatannya, dimana salah satunya dengan memaksimalkan potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok. Obyek Retribusi Daerah yang disosialisasikan pada tahun 2008 adalah mengenai Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tepi Jalan Umum. Dapat didefinisikan Nama, Objek dan Subjek sebagai berikut : Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi jalan umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah Daerah sedangkan definisi Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan penyediaan tempat parkir yang meliputi :

- a. Parkir di tepi jalan umum
- b. Parkir Gedung
- c. Parkir pelataran pada bangunan umum

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka dibentuklah Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/74/KPTS/WSL-2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dan Parkir ditepi jalan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Didalam Surat Keputusan Walikota Solok tersebut menjelaskan bahwa Pengaturan dan pengelolaan Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok dengan kewenangan parkir ditepi jalan umum, beserta dengan Kantor Pengelola Pasar dengan wilayah kewenangan tempat parkir khusus sebagai instansi SKPD yang berwenang.

Namun didalam kenyataannya SKPD Instansi tersebut tidak langsung mengelola wilayah parkir tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai Peraturan Daerah tersebut berikut ini beberapa hal mendasar yang dapat dikemukakan mengenai Peraturan Daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pada Pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi”. Kegiatan retribusi parkir tersebut sebelumnya dilaksanakan uji petik / percobaan dari Perda tersebut dengan diadakannya perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menekan jenis-jenis biaya yang timbul dari Retribusi parkir tersebut. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Solok untuk menertibkannya

diadakan kerjasama dengan menertibkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang berlaku 12 bulan dan besaran setoran mereka didasarkan pada target tawar menawar, namun langkah tersebut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan target dari Pemerintah Kota.

Oleh karena belum adanya perencanaan penerimaan retribusi parkir meskipun pertumbuhan penerimaannya cukup besar setelah dilaksanakannya Perda, namun dalam pengelolaannya diperkirakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penerimaan dibandingkan dengan potensi yang ada. Adapun pertumbuhan realisasi penerimaan tersebut adalah seperti dalam tabel berikut:

Table 1.1
Laporan Penerimaan Hasil Pemungutan Retribusi Parkir yang dikelola oleh
Dinas Perhubungan Kota Solok
Tahun 1997 – 2011

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2007	65.050.000	62.164.167	0
2008	65.050.000	63.171.145	2%
2009	76.080.000	63.018.000	1%
2010	111.800.000	87.217.000	40%
2011	510.000.000	401.612.000	546%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Solok

Dari laporan Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2011 pemungutan retribusi parkir meningkat secara tajam, hal ini disebabkan karena pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum langsung dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok, meskipun sudah ada Perda yang mengatur tentang pengelolaan retribusi itu, namun didalam pengelolaan retribusi

daerah tersebut diperkirakan masih ada masalah lain seperti masih lemahnya sistim pengawasan terhadap pemungutan retribusi hal ini disebabkan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dan kompetensi dibidang pengelolaan PAD umumnya dan retribusi parkir khususnya

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu : “ *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok*”

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dalam usulan penelitian ini sesuai dengan judul usulan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan retribusi parkir dan perkembangan penerimaan retribusi Parkir sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008
2. Bagaimana kinerja efektifitas dan efisiensi pengelolaan Parkir sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan lahirnya Perda baru tentang Retribusi Parkir di Kota Solok, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok

2. Menganalisis kinerja Pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan parkir ditepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah 5 tahun 2008 apakah sudah efisien dan efektif pengelolaan Parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kelembagaan Akademik

Memberikan input yang baik bagi dunia pendidikan sebagai alat penguji untuk sebuah konsep-konsep yang dikeluarkan yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

b. Kelembagaan Pemerintahan

Sebagai bahan masukan – masukan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Implemetasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Solok dan mengurus pelayanan jasa guna lebih meningkatkan kinerja para aparat dalam mengembangkan tugas dan kewajiban untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Yani (2002), Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Laporan Departemen Keuangan-RI (2004), dijelaskan bahwa kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/ kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.1.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut perkembangannya jenis retribusi ini diatur dengan tiga Undang-Undang, dimana Undang-Undang tersebut mengalami perubahan sebanyak tiga kali yakni Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir setelah adanya Undang-Undang dan 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 109.

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya.

- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus
- 11) Retribusi Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan
 - d) Retribusi Terminal
 - e) **Retribusi Tempat Khusus Parkir**
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h) Retribusi Pelayanan Pelabuhan
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - j) Retribusi Penyeberangan di Air
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir

Retribusi Parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu pemungutan yang dilakukan pemanfaatannya oleh masyarakat, sehingga pengakuan pendapatan dilakukan saat diterimanya retribusi tersebut oleh kantor kas daerah (bendahara penerima). Dengan demikian karena sifatnya penerimaan pendapatan, maka pembukuan pengakuan pendapatan atas transaksi-transaksi pemungutan retribusi dicatat pada saat kas diterima. Proses pemungutan, pencatatan dan penerimaan retribusi memerlukan pengawasan dengan tujuan pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Seperti Akuntansi Keuangan yang mempunyai standar akuntansi keuangan, maka akuntansi pemerintahan juga mempunyai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam standar akuntansi pemerintah tidak mengatur pencatatan retribusi parkir secara

husus, tetapi mengatur secara umum tentang akuntansi pendapatan, menurut PP 71 tahun 2010 yang terdapat dalam standar akuntansi Pemerintah nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dalam pernyataan standar tersebut “Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari retribusi daerah. Pencatatan retribusi parkir dilakukan dengan menggunakan dasar pencatatan berbasis kas, yaitu pendapatan atas retribusi parkir ditepi jalan umum diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah.

Pelaporan Retribusi Parkir dilaporkan dalam laporan keuangan dan peraturan yang mengatur secara umum tentang laporan terhadap retribusi parkir.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan serta entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dalam mengevaluasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas, entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ihtisar, sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah pusat / daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu priode pelaporan.

Unsur yang mencakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-RLA, belanja, transfer dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengelolaan uang suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- d) Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan dan Pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran

Pencatatan akuntansi yang digunakan dalam laporan ini yakni berbasis kas yang artinya basis Akuntansi yang mengakui pengaruh / transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, karena Akuntansi Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara / Daerah

Retribusi parkir merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan merupakan bagian dari pos laporan keuangan dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.4 Dasar Hukum Retribusi Pengelolaan Parkir

Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya sebagai persetujuan yang juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dan direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan

ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya. Dasar lainnya pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri KM Nomor 66 tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 1994 Tentang Tata cara Parkir kendaraan bermotor di jalan telah diatur fasilitas parkir untuk umum dan tata cara parkir di jalan dengan keputusan Dirjen Darat Nomor. 272/HK.105/DRJD/96

Berkaitan dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22/1999 Tentang Otonomi Daerah menyebabkan banyak Pemerintahan Daerah menggiatkan berbagai pungutan daerah dalam bentuk pajak atau retribusi atau sumbangan pembangunan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Krisis ekonomi menyebabkan semakin berkurangnya dukungan finansial Pemerintah Pusat kepada Daerah. Untuk itu pemerintah Daerah Kota Solok mencoba membiayai daerahnya sendiri salah satunya dengan cara pungutan retribusi parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 retribusi tempat khusus parkir ditepi jalan umum Pada pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain percetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lainnya, kegiatan pemungutan retribusi dan lain-lainnya. Kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan, penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Dalam pelaksanaan perparkiran ada beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, seperti dengan telah disahkannya Perda Retribusi tempat khusus Parkir dan parkir ditepi jalan umum, pada pasal tersebut sangat jelas diterangkan bahwa tidak boleh dipihak ketigakan, tetapi tidak berkemungkinan melakukan “kerjasama” dengan pihak ketiga dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku. Saat dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, ternyata dilapangan, pihak ketiga itu juga tidak langsung bekerja menangani mengenai perparkiran

2.1.5 Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir sangat dibutuhkan diperkotaan. Penerimaan dari retribusi parkirpun diharapkan meningkat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010, maka dirasa perlu menetapkan Produk hukum tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari pengelolaan parkir untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir, akan tetapi bila parkir didaerah perkotaan baik, maka akan minim permasalahan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi kendaraan dan menginginkan kendaraan diparkir ditempat yang tidak jauh dari tujuannya dan mudah dicapai.

Penyediaan tempat-tempat parkir dipinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik dibadan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan

mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan menggunakan jalan menjadi tidak efektif. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilik kendaraan penambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dan gedung perkantoran, pertokoan dan sebagainya. (Surami, 2002)

2.1.5.1 Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Menurut Suardi (2008), perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen berlalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan.
- b. *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan melalui Retribusi Parkir*
- c. Meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan peranannya
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas

e. Mendukung tindakan perbatasan lalu lintas lainnya.

Sasaran tersebut dilakukan secara tersendiri tetapi cenderung untuk saling melengkapi.

Untuk memaksimalkan penyelenggaraan parkir harus didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas parkir

2.1.5.2 Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Negara Maju

Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dinegara maju telah menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir diserahkan kepada pihak ketiga. Menurut Santoso (1990), salah seorang pakar kebijakan dikenal dengan nama *American Policy Commission* mendefinisikan “*Public policy is a projected program of goals, values and practices.*” (kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu). Dinegara maju seperti Amerika Serikat, kebijakan pengelolaan Parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta), dengan tujuan lebih memaksimalkan pendapatan daerah dengan nilai dan praktek tertentu dan mengharapkan perkembangan dari penerimaan retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan. NewYork merupakan salah satu kota terbesar di Amerika Serikat yang merupakan salah satu kota terpadat di dunia, penetapan tarif parkir dilakukan dengan menetapkan tarif lebih tinggi kepada pengguna jasa parkir yang berada dilokasi tepi jalan umum yang rawan kemacetan,

contohnya biaya parkir di Big Apple sebesar US 40 atau sebesar 383.000,-. Hal ini tentunya juga sepadan dengan nilai biaya yang dikeluarkan oleh Pihak ketiga (swasta) seperti penerapan teknologi dengan sistem kontrol yang dapat memproses dan mengolah data suatu kegiatan parkir dengan cepat dan praktis serta kelengkapan parkir lainnya.

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 69 tahun 2010 Penyelenggaraan Fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :

1. Pemerintah
2. Badan hukum Indonesia
3. Warga Negara Indonesia

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum atau warga Negara Indonesia harus dengan izin. Izin diberikan oleh Pemerintah Daerah, Ketentuan ini dimaksud agar fasilitas parkir untuk umum disediakan agar bisa memenuhi persyaratan keselamatan dan bisa menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakannya sendiri fasilitas parkir dengan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan parkir diperlukan aspek pembinaan lalu lintas di jalan khususnya mengenai Parkir meliputi aspek-aspek sebagai berikut yakni pengaturan, pengendalian dan Pengawasan yang ditujukan untuk keselamatan,

keamanan ketertiban, kelancaran lalu lintas. Didalam melakukan pembinaan penyelenggaraan parkir juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan. Kelestarian lingkungan, tata ruang, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antara wewenang pembina lalu lintas jalan ditingkat Pusat dan Daerah serta antara dinas instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Dalam pembinaan penyelenggaraan parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional.

Disamping itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan jalan, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan diseluruh jaringan primer dan sekunder yang ada ditanah air (Sufaeni, 2010).

2.1.5.3. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Parkir

Besarnya tekanan agar instansi pemerintah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas mempengaruhi praktek-praktek penyelenggaraan operasi entitas sektor publik untuk memberi tanggapan akan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai salah satu stakeholder, lembaga-lembaga publik diharapkan memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan menunjukkan stawerdship

dan akuntabilitas lembaga akan sumber daya – sumber daya publik yang dikelolanya agar lembaga-lembaga Negara menjalankan aktifitasnya dengan baik dan mampu memperbaiki kualitas pelayanannya kepada masyarakat, maka dirancang sistem pengukuran kinerja agar peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Salah satu hal penting dalam pengukuran kinerja yang dapat mengidentifikasi kan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat adalah menetapkan indikator kinerja dan target kinerja. Penerapan indikator dan target kinerja dalam suatu sistim pengukuran kinerja merupakan tahap penting yang harus dilakukan secara berhati-hati. Penerapan indikator dan target kinerja penting untuk melihat apa ukuran yang dipakai untuk mencapai kesuksesan suatu program atau organisasi untuk mencapai tujuan dan misinya. Evaluasi kinerja manajemen parkir dalam hal ini pelayanan dan fasilitas yang ada. Parkir sebagai manajemen kebutuhan transportasi di kota-kota diharapkan agar dapat meningkatkan kenyamanan berlalulintas dan meningkatkan pemasukan keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan yang sangat berarti bagi sistim lalulintas secara keseluruhan.

Masalah parkir yang dialami diperkotaan seperti :

1. Terganggunya arus lalulintas terus menerus akibat arus keluar masuknya parkir

2. Lemahnya akses parkir dan tidak terkoordinirnya arus lalu lintas internal dan eksternal
3. Tidak seimbangnya permintaan (demand) dengan ketersediaan (supply) pada waktu tertentu (jam puncak) lokasi tertentu (pusat kota)
4. Ruang parkir menutup kemudahan pergerakan pejalan kaki
5. Manajemen keuangan pengelolaan parkir on-street
6. Kurang berkembangnya fasilitas park and ride untuk mendukung perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan masa

2.1.5.4. Tujuan pengelolaan manajemen parkir adalah :

1. Meningkatkan kinerja arus lalu lintas yang tertib
2. Meningkatkan aksesibilitas parkir bagi pengguna
3. Memberikan pelayanan yang baik sehingga terjadi perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna angkutan umum dan pejalan kaki
4. Pelayanan dengan diutamakan pada aspek keselamatan, keamanan lalu lintas
5. *Pengelolaan yang amanah, jujur dan profesional mencegah dari kebocoran keuangan dalam peningkatan Retribusi Parkir*
6. Pelayanan parkir yang memungkinkan tingkat emisi udara dan global

Organisasi pelayanan publik yang menyediakan jasa publik, masyarakat sebagai pemanfaat pelayanan publik di pihak lain oleh karenanya keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir, kemampuan pelaksana adalah kemampuan pelaksana jasa pengelola perparkiran secara efisien dan efektif.

Dalam konteks kebijakan Retribusi, pengukuran kinerja kebijakan dapat dilakukan dengan menghitung tingkat *efektifitas dan efisiensi Retribusi parkir*.

2.1.5.5. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Retribusi Parkir

Secara umum setiap Pemda berusaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan parkir. Mahmudi (2007), mengemukakan definisi istilah Efektifitas sebagai berikut : “suatu organisasi atau unit organisasi dikatakan efektif jika keluaranya memberikan sumbangan yang besar terhadap pencapaian organisasi” jadi dalam melihat dan menilai efektifitas suatu organisasi atau unit organisasi kita melihat seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Irfan (1996), efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Prakosa (2003), efektifitas adalah imbalan antara pendapatan (retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu retribusi yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar, dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan benar-benar memenuhi kewajibannya.

Selain dengan mengukur tingkat efektifitasnya, kinerja parkir juga dapat diukur melalui tingkat efisiensinya.

Secara umum Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan

input atau dengan istilah lain *output* per unit *input* (Mahmudi, 2007).

Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Secara umum, efisiensi dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) demi suatu proses, dan pada tingkatan tertentu efisiensi akan menyangkut analisa hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir, peneliti akan menggunakan matriks pengukuran kinerja implementasi, dengan membandingkan apakah dampak kebijakan sudah memenuhi maksud kebijakan. Penggunaan matriks pengukuran kinerja kebijakan akan lebih mampu menjawab permasalahan penelitian seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2008 semenjak diberlakukannya Perda Retribusi tempat khusus Parkir dan parkir ditepi jalan umum, masih dicoba melakukan uji petik dari Perda tersebut dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, apakah ada sosialisasi pemberlakuan kebijakan pemungutan retribusi parkir akan dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir tersebut, selain itu untuk membantu peneliti dalam mengukur kinerja kebijakan retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi jalan umum di Kota Solok, maka akan digunakan cara pengukuran kinerja kebijakan retribusi melalui formula efektifitas dan efisiensi.

2.2. Kriteria Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu (Sufaeni, 2010) :

a. Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

b. Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

c. Kemampuan Administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

2.3 Perhitungan penerimaan potensi parkir

Menurut Pedoman teknis Penyelenggaraan Parkir yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, untuk menetapkan besarnya retribusi yang akan diterima maka dilakukan perhitungan Potensi pada wilayah Parkir tersebut bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan

demikian, besarnya penerimaan retribusi tersebut dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur.

Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan

prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Prakosa (2003), menyatakan prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total dari pelayanan-pelayanan yang disediakan.

Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- a) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum.
- b) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c) Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*.
- d) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan *group-group* berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

2.4 Telaah Peneliti Sebelumnya

Telaah peneliti sebelumnya dilakukan sebagai perbandingan dari penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut yakni :

Tabel 2.1
Daftar Hasil-hasil Peneliti Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Tahun	Kesimpulan
Fachanie	Analisa Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kab. Sleman	2007	Praktek pemungutan pajak parkir di Kab.Sleman serta pengukuran tingkat efisien dan efektifitas praktek pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh BPKKD hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan pajak parkir masih dibawah potensi sebenarnya, praktek pemungutan dari tahun ketahun semakin efisien, sedangkan tingkat efektifitasnya berfluktuasi
2. Enambe	Studi implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir ditepi jalan umum Kota Semarang	2006	Implementasi Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir ditepi jalan umum dikawasan simpang lima Kota Semarang kurang berhasil yang disebabkan kurang komonikasi antara juru parkir dan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut
3. Surami	Implementasi tentang kebijakan Juru Parkir di Kota Semarang	2002	Laporan penerimaan hasil retribusi parkir dengan realisasi target sebesar 60-80%, karena rendahnya kemampuan pelaksana dalam perparkiran dan kurangnya dukungan publik dalam memberikan informasi

Dibandingkan dengan penulisan yang dilakukan kali ini, penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok, yang mana pengelolaan Parkir di Kota Solok awalnya dikelola oleh Pihak ketiga, setelah diterapkannya Perda Nomor 5 tahun 2008 pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan lebih efektif dan efisien, walaupun implementasi Perda mengenai Retribusi Parkir tidak langsung terlaksana pada tahun dikeluarkannya Perda tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, salah satu jenis retribusi jasa umum yakni retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, dalam tesis ini kewenangan wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok yakni parkir ditepi jalan umum. Dengan ada Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 diharapkan penerimaan Retribusi Parkir meningkat

Pemerintah Kota Solok menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi jalan ini dengan upaya lebih mengoptimalkan implementasinya. Iuran Daerah ini keluar sebagai bentuk penegasan Pemerintah Kota Solok waktu itu yang melihat bahwa sektor perparkiran di jalan umum harus diatur dengan baik.

Perparkiran di Kota Solok dilaksanakan oleh 2 (dua) Instansi SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) yakni pengelolaan parkir yang dikelola oleh Dinas Pasar merupakan wewenang wilayah pasar, dan pengelolaan parkir hanya khusus wilayah pasar raya saja, dan juga parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok.

Dalam penulisan tesis ini penyaji hanya memaparkan pengelolaan parkir

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok, karena pengelolaan Parkir merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan.

3.2 Data Dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara) dengan cara yakni melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh mekanisme prosedur pengelolaan retribusi Parkir sebelum dan setelah dilaksanakannya Perda Nomor 5 Tahun 2008

Wawancara ini dilakukan kepada :

- Kepala Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan atau pun keputusan dalam perparkiran, dan untuk mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan retribusi parkir
- Kepala Seksi Perpajakan sebagai Pejabat Pengadaan Teknik Kegiatan (PPTK) dari Perpajakan, agar dapat mengetahui mekanisme pengelolaan retribusi parkir sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 tahun 2008 dengan mengadakan kerjasama kepada pihak ketiga serta penerapan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan
- Bendaharawan Penerima Retribusi di Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok, agar dapat mengetahui seberapa penyetoran retribusi dari perpajakan tersebut, serta berapa jumlah retribusi parkir

yang disetor tiap bulannya.

- Bidang Pendapatan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solok. wawancara dilakukan agar dapat melihat berapa biaya-biaya yang ditimbulkan dari pengelolaan Retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tersebut.

b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari buku Solok dalam angka serta beberapa dokumen yang diperoleh dari laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Solok dan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di DPPKA.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Analisa diskriptif digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan penerimaan retribusi secara umum serta penerimaan retribusi parkir secara khusus. Sedangkan analisa kuantitatif menggunakan analisa menggunakan perhitungan formula efektifitas dan efisiensi. Formula ini juga sudah digunakan dalam teori yang dikemukakan oleh Nick Devas.

Adapun peralatan analisis kuantitatif digunakan formula efisiensi dan efektifitas sebagai berikut :

a. Efisiensi

Seperti yang sudah dikemukakan oleh Devas (1989) Berkaitan dengan

Retribusi Parkir, pengukuran Efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil Retribusi Parkir yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi. Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendataan, dan Penetapan besarnya retribusi parkir terutang, serta biaya penagihan sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai.

Perhitungan efisien dapat dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi menerimaannya. Untuk melihat dan menganalisis efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Solok digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Penerimaan retribusi dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan retribusi semakin besar jika biaya perolehan penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil penerimaan retribusi. (Mulfi, 2011).

b. Efektifitas

Efektifitas adalah berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Dalam perhitungan efektifitas, metode diformulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektifitas tersebut disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Untuk kriteria prosentase penilaian efisien dan efektifitas retribusi parkir tepi dijalan umum adalah :

Tabel 3.1
Formula Efisiensi dan Efektivitas

No	Formula	Prosentase	Kriteria
1	Efisiensi = $\frac{\text{Biaya Pemungutan retribusi}}{\text{Realisasi retribusi}} \times 100\%$	Efisiensi	
2		< 40%	Sangat Efisien
3		40% - 60%	Cukup Efisien
3		60% - 80%	Efisien
		80% - 100%	Sangat Efisien
1	Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi retribusi}}{\text{Potensi penerimaan retribusi}} \times 100\%$	Efektivitas	
2		80% - 100%	Sangat Efektif
3		60% - 80%	Efektif
3		40% - 60%	Cukup Efektif
		< 40%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik

Dari pengertian efektifitas tersebut disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Untuk kriteria prosentase penilaian efisien dan efektifitas retribusi parkir tepi dijalan umum adalah :

Tabel 3.1
Formula Efisiensi dan Efektivitas

No	Formula	Prosentase	Kriteria
1 2 3	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan retribusi}}{\text{Realisasi retribusi}} \times 100\%$	Efisiensi < 40% 40% - 80% > 80%	Sangat Efisien Efisien Tidak Efisien
1 2 3	$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi}}{\text{Potensi penerimaan retribusi}} \times 100\%$	Efektivitas > 80% 40% - 80% < 40%	Sangat Efektif Efektif Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik

c. Analisa Komparatif

Analisa Komparatif ini dilakukan untuk membandingkan pertumbuhan penerimaan retribusi Parkir sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008. Bagaimana efisiensi dan efektifitas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 tahun 2002 dengan adanya kebijakan pengelolaan retribusi parkir melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dari analisa akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran dari masing-masing usaha untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi Parkir ini baik sistim dan prosedur pengelolaan retribusi parkir sebelum dan setelah diterapkannya Perda tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah

Kota Solok memiliki posisi yang cukup strategis karena dilalui oleh karena dilalui oleh jaringan transportasi darat regional serta nasional. Secara geografis Kota Solok terletak antara $0^{\circ} 32' - 1^{\circ} 45' \text{ LS}$ dan $101^{\circ} 32'$ dan $101^{\circ} 41' \text{ BT}$ yang berbatasan langsung dengan berbagai nagari di Kabupaten Solok, sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung dan Kuncir Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok laweh, Guguk Sarai dan Gaung Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Panyangkalan, Kotobaru dan Selayo. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Selayo. Secara Administrasi Kota Solok terdiri dari dua Kecamatan dan tiga belas dengan luas wilayahnya sekitar 5.764 Ha atau 57,64 Km^2 . Daerah Kota Solok merupakan wilayah daratan dengan luas wilayah sebesar 5.764 Ha / 57,64 km^2 . Pada tahun 2011, Kota Solok memiliki 2 (dua) Kecamatan ; Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan serta 13 Kelurahan, 49 RW dan 126 RT. Sebagian besar penggunaan tanah di Kota Solok digunakan sebagai hutan seluas 1.360,23 Ha atau 23,60% dari wilayah Kota Solok. Sebagian besar lainnya untuk areal sawah seluas 1.253,62 Ha

atau 21,75% dari total wilayah Kota Solok. Penggunaan di Kota Solok untuk areal perumahan masih sebesar 780.67 ha atau 13,54% dari luas wilayah Kota Solok. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Propinsi Sumatera Barat, luas wilayah Kota Solok berada pada urutan kelima setelah Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

Jumlah penduduk daerah Kota Solok pada tahun 2011 adalah sebanyak 59.396 orang yang terdiri dari 29.359 orang laki-laki dan 30.037 orang perempuan dengan rasio kelamin 97,74. Sebagian besar penduduk 10 tahun ke atas menurut lapangan usaha adalah perdagangan (36,09%) dan Jasa (30,43%). Sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian hanya sebesar 9,28%. Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia aparatur Pemda yang akan memberikan pelayanan terhadap publik berjumlah 2.453 orang pada tahun 2011. Jumlah pegawai Pemda tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 32 orang, golongan II sebanyak 692 orang, golongan III sebanyak 1.408 orang dan golongan IV sebanyak 673 orang, dan untuk pegawai dinas Perhubungan sebanyak 92 orang. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ada maka SDM aparatur yang berpendidikan sederajat tingkat SLTA berpendidikan tingkat SLTA atau sederajat sebanyak 632 orang. Sarjana Muda dan Akademi sebanyak 656 orang, tingkat Sarjana 1307 orang, dan Pasca Sarjana adalah 126 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah aparatur Pemda yang memiliki kualitas pendidikan sudah cukup memadai yakni tingkat sarjana muda ke atas sudah mencapai 69,32 persen.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang relatif tinggi sudah tentu memberikan gambaran kinerja yang baik dari Pemdanya. Pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dan berbasis pada aktifitas ekonomi rakyat di tingkat lokal secara berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak luar. Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan akan menimbulkan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya republik).

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Solok selama 5 tahun terakhir (2007-2011) ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dimana secara rata-rata mencapai 5,66% per tahun. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,83%. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 9,39% dan kemudian meningkat menjadi 9,13 % pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Solok ternyata juga cukup tinggi yakni mencapai sebesar 9,03 %.

Terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Kota dalam menyelesaikan

persoalan ekonomi melalui berbagai macam kebijakannya, seperti meningkatkan investasi dan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Disamping itu Pemda juga mendorong agar berperannya sektor perbankan dalam membiayai sektor riil terutama untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Kontribusi sektor ekonomi yang cukup besar yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 cukup meningkat secara signifikan adalah sektor pengangkutan dan telekomunikasi. Pada tahun 2008 laju pertumbuhannya baru mencapai sebesar 17,02 % dan kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 17,41%. Hal ini seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana angkutan jalan raya (darat) dan jasa penunjang angkutan lainnya.

Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan sektor ini baru mencapai sebesar 10,43 %, kemudian meningkat menjadi 10,49 % pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi 10,81 % pada tahun 2011. Terjadinya peningkatan sektor perdagangan, dan restoran ini memberikan gambaran bahwa Pemda Kota Solok benar-benar telah memberikan pelayanan yang baik kepada stakeholdersnya sesuai dengan visi dan misi kota. Relatif tingginya laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan & komunikasi diharapkan memberikan dukungan dan dorongan yang cukup kuat untuk pengembangan sektor

pariwisata di masa mendatang. Terjadinya perkembangan sektor pariwisata tersebut sudah tentu dapat diharapkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan PAD.

Selanjutnya sektor lapangan usaha lainnya yang juga mengalami pertumbuhan cukup pesat dari tahun ke tahun adalah listrik, gas dan air bersih. Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha listrik gas dan air bersih dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 14,56%, Pertumbuhan yang tertinggi dan pernah dicapai oleh sektor ini adalah terjadi pada tahun 2007, dimana laju pertumbuhannya mencapai sebesar 3,44 %.

Terjadinya perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih yang cukup menggembirakan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan sektor ekonomi lainnya di Kota Solok. Untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan PDRB Kota Solok selama periode 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 - 2011 (%)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1. PERTANIAN	6,66	3,70	3,74	3,24	3,19	4,11
a. Tanaman Pangan & Holtikultura	4,37	4,63	4,76	4,12	4,28	4,43
b. Tanaman Perkebunan	7,86	7,93	8,32	7,56	6,77	7,69
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	8,47	2,54	2,57	2,12	1,94	3,53
d. Kehutanan						
e. Perikanan	9,17	5,73	3,94	4,27	3,68	5,36
2. PERTAMBANGAN SPENGGAUAN	1,15	5,62	4,94	4,82	4,59	4,22
a. Migasdan Gas Bumi						
b. Non Migas						
c. Penqg3lian	1,15	5,62	4,94	4,82	4,59	4,22
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,60	7,36	6,89	6,24	6,34	5,89
a. Industri Migas						
b. Industri Non Migas	2,60	7,36	6,89	6,24	6,34	5,89
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	6,79	9,28	10,41	8,29	8,04	8,56
a. Listrik	6,90	9,02	10,54	8,34	8,04	8,57
b. Gas						
c. Air Bersih	5,92	11,38	9,37	7,89	8,02	8,52
5- BANGUNAN	3,21	4,63	4,68	6,46	6,19	5,03
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	4,31	5,12	6,04	6,69	6,93	5,82
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,31	5,16	6,14	6,80	7,06	5,89
b. Hotel	1,12	1,19	2,18	3,90	3,12	2,30
c. Restoran	4,93	5,34	5,33	5,55	985,11	201,25
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,54	7,21	7,86	7,95	8,02	7,32
a. Angkutan	5,11	5,23	4,67	6,13	5,67	5,36
1. Angkutan Kereta Api						
2. Angkutan Jalan Raya	5,16	5,27	4,68	6,12	5,66	5,38
3. Angkutan Laut Sungai, Danau & Penyeberangan						
4. Angkutan Udara						
5. Jasa Penumpang Angkutan	2,02	2,81	4,06	6,91	6,64	4,49
b. Komunikasi	7,65	16,75	21,69	14,76	16,12	15,39
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	5,92	10,23	5,16	6,71	6,72	6,95
a. Bank	4,48	16,59	-2,74	6,03	5,87	6,05
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa penunjang	9,53	8,53	13,89	8,91	9,15	10,00
c. Sewa Bangunan	4,41	4,52	6,93	5,27	5,16	5,26
d. Jasa Perusahaan	3,10	3,07	2,67	4,32	3,88	3,41
9. JASA-JASA	3,76	2,86	4,61	4,95	5,59	4,35
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	3,51	2,71	3,18	3,89	4,76	3,61
b. Swasta	4,08	3,05	6,45	6,27	6,60	5,29
1. Sosial Kemasyarakatan	2,08	2,79	3,95	4,12	4,26	3,44
2. Hiburan & Rekreasi	2,16	2,47	2,92	3,12	3,02	2,74
3. Perorangan & Rumah tangga	5,23	3,21	7,89	7,48	7,87	6,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,49	5,48	5,81	6,17	6,35	5,66

Sumber: DPPKA Kota Solok

4.3. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sumber penerimaan PAD yang berasal dari pajak terbagi atas 6 jenis, dari retribusi lebih kurang 23 jenis, bagian laba perusahaan daerah 1 jenis, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Perkembangan penerimaan PAD dari tahun ke tahun tampaknya mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan menggembirakan meskipun masih mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Selama periode 2007-2011, laju pertumbuhan penerimaan PAD secara rata-rata per tahun mencapai sebesar 37,63%. Laju pertumbuhan sumber penerimaan PAD yang paling tinggi adalah berasal dari Bagian Laba Lembaga Keuangan (BPD) sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada periode tersebut laju pertumbuhan Bagian Laba Lembaga Keuangan (BPD) secara rata-rata mencapai sebesar 86,30% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan sumber penerimaan PAD ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kota Solok dalam mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah sebagai bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir (2007-2011) juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, dimana secara rata-rata tumbuh sebesar 13,51%. Beberapa komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata yang

komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata yang paling besar berturut-turut selama tahun 2007-2011 adalah Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 68,48%, pajak reklame sebesar 30,86%, pajak hiburan sebesar 25,78%, pajak hotel sebesar 22,77%, pajak penerangan jalan 12,93% dan pajak restoran sebesar 3,99%. Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak hiburan relatif besar akan tetapi didalam perkembangannya mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hiburan tersebut belum dilakukan secara maksimal meskipun potensinya juga relatif besar. Seiring dengan perkembangan penerimaan pajak daerah di atas, retribusi daerah juga mengalami perkembangan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Selama periode 2007-2011 pertumbuhan penerimaan retribusi daerah secara rata-rata mencapai sebesar 15,99% per-tahun.

Adapun komponen penerimaan retribusi daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah Retribusi Terminal sebesar 6,76 %, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 3,92 % dan Retribusi Pelayanan Parkir sebesar 1,73 %. Relatif tingginya kontribusi ketiga jenis Retribusi tersebut adalah merupakan hal yang wajar dan rasional, karena sebagai daerah kota yang sedang berkembang secara pesat ketiga jenis pelayanan tersebut juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Secara keseluruhan perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok periode 2007-2011 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok
Tahun 2007-2011 (%)

NO	JENIS PENERIMAAN	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
I.	POS PAJAK DAERAH ;	6,75	13,97	12,50	6,54	26,33	15,64
1	Pajak Hotel	27,07	24,75	28,18	11,06	43,09	26,83
2	Pajak Restoran	(20,90)	14,79	9,49	12,58	92,18	41,63
3	Pajak Hiburan	111,45	(62,63)	161,72	67,72	153,76	47,11
4	Pajak Reklame	15,03	74,24	11,45	42,01	68,34	37,10
5	Pajak Penerangan Jalan	4,42	15,62	10,06	5,59	12,52	12,86
6	Pajak Bahan Galian Gotong C	26,67	(54,29)	142,49	15,39	204,34	91,13
II	POS RETRIBUSI DAERAH	1,99	1,86	20,24	20,63	38,47	14,60
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10,05	13,28	37,27	(58,65)	44,68	60,46
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	35,02	7,06	15,85	16,67	13,8	1,61
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Capil	12,35	(1,42)	(29,94)	43,56	17,67	127,85
4	Retribusi Pelayanan Pasar	27,55	35,81	(21,51)	18,31	28,81	7,00
5	Retribusi Terminal	6,07	(6,96)	20,07	2,86	20,55	6,75
6	Retr. Khusus Parkir & ParkirTepi Jin Umum	(26,16)	44,35	66,63	70,09	114,91	133,74
7	Retribusi Penyedotan Kakus	14,88	13,99	13,82	11,42	17,20	2,33
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	(3,94)	19,79	(21,58)	(0,04)	(10,26)	(2,91)
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20,00	43,33	23,79	(27,26)	42,86	33,79
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,50	4,31	20,20	37,72	16,81	28,65
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			733,33			
12	Retribusi Izin Gangguan	(6,74)	34,65	35,93	(2,80)	159,11	34,09
13	Retribusi Izin Trayek	(39,99)	(21,89)	(60,09)	276,74	(23,58)	28,93
14	Retribusi Penptn dan Peny.Tenaga Kerja	(70,00)	500,00	83,33	(63,64)	(58,33)	131,89
15	Retribusi Pemanfaatan Tanah Pemda	112,50		70,59	(44,83)		27,65
16	Retr. Izin Peng.Tnh, Cet Peta,IMB	55,81	(5,64)	3,42	1,17	120,33	28,55
17	Retribusi Leges						
18	Retribusi Izin Pedagangan dan Perindustrian	(20,25)	48,19	35,69	(20,56)	3,16	18,22
19	Retribusi Pelayanan kes. Peserta Askes	21,45	(4,67)				8,39
20	Retribusi Pembuatan Bestek	87,39	(48,53)	94,57	50,97	13,55	59,59
21	Retribusi Perkawinan Kuda & Kiri Kuda tank	(17,24)	62,50	19,54	(93,80)	1.020,00	232,20
22	Retribusi SIUJK		(10,57)	26,11	(38,68)	(27,46)	37,35
3.1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				1,11	29,40	15,25
24	Retribusi Izin Usaha Angkutan				55,46	(7,86)	23,80
25	Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta						
III	HASIL PERS.MIUK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	80,80	93,60	41,71	141,95	45,51	79,50
IV	LAJIN-LAIN PAD YANG SAH	19,14	21,53	92,29	(1,82)	12,72	44,57
	TOTAL PAD	19,01	18,84	17,15	17,44	20,83	33,98

Sumber : DPPKA Kota Solok

4.4. Kontribusi Penerimaan Masing-Masing Komponen PAD

Disamping menganalisis pertumbuhan penerimaan PAD maka analisis terhadap peranan masing-masing penerimaan komponen PAD juga perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui komponen penerimaan apa saja yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan PAD

Berdasarkan data yang tersedia ternyata komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi yang paling tinggi adalah Pajak Penerangan Jalan secara rata-rata mencapai 8,24%. Sedangkan jenis-jenis pajak daerah lainnya ternyata memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap PAD dimana besarnya hanya dibawah 1%. Dengan demikian salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai sekarang ini adalah pajak penerangan jalan. Namun di sisi lain, meskipun kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan adalah masih relatif kecil, tetapi potensi sumber penerimaannya dimasa mendatang diperkirakan juga cukup besar. Hal ini disebabkan disamping pertumbuhan penerimaannya secara rata-rata per tahun cukup besar, untuk daerah perkotaan seperti Kota Solok kegiatan kedua jenis sumber pajak ini umumnya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari penerimaan Retribusi pertumbuhan penerimaan pajak hotel secara rata-rata mencapai sebesar 22,77% per tahun, dan pertumbuhan pajak hiburan mencapai 25,78%. Untuk melihat perkembangan kontribusi masing-masing jenis penerimaan PAD secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah
Terhadap Total PAD Kota Solok Tahun 2007 - 2011 (%)

NO	JENIS PENERIMAAN	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
I	POS PAJAK DAERAH :	9,40	9,02	8,93	10,88	16,41	8,74
	Pajak Hotel dan Restoran						0,09
1	Paiak Hotel	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,06
2	Paiak Restoran	0,27	0,26	0,17	0,27	0,44	0,24
3	Paiak Hiburan	0,15	0,05	0,07	0,02	0,15	0,08
4	Pajak Reklame	0,23	0,34	0,22	0,29	0,42	0,30
5	Paiak Penerangan Jafan	8,42	8,19	5,27	5,18	5,13	7,78
6	Paiak Bahan Galian Golongan C	0,26	0,10	0,14	0,15	0,39	0,19
N	POS RETRIBUSI DAERAH	20,94	17,95	13,45	15,10	0,37	17,37
L	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,29	0,28	0,77	0,30	0,96	0,51
2	Retribusi Pelayanan PersamDahan	1,94	1,75	1,04	1,13	0,74	1,59
3	Retribusi ICTP/CaCMI	0,67	0,56	0,23	0,73	1,89	0,71
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3,86	4,41	2,02	2,23	3,73	3,89
5	Retribusi Terminal	6,82	5,34	3,75	3,59	3,06	5,95
6	Retr. Parkir Tepi jln Umum	0,48	0,59	0,91	1,44	3,05	1,91
7	Retribusi Penyedotan Kakus	0,11	0,11	0,07	0,07	0,29	0,15
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,87	0,88	0,40	0,37	0,05	0,79
9	Retribusi Temnat Rekreasi dan Olah Raga	0,05	0,09	0,04	0,05	1,40	0,25
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,75	1,54	1,08	1,38	0,00	1,37
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		0,00	0,01		0,16	0,02
12	Retribusi Izin Ganqqan	0,09	0,10	0,08	0,07	0,01	0,10
13	Retribusi Izin Travek	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
14	Retribusi Penptn dan Peny.Tenaga Kerja	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
15	Retribusi Pemanfaatan Tanah Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,15
16	Retr. Izin Tnh, Cetak Peta,IMB	1,22	0,97	0,58	0,54	-	0,84
17	Retribusi Leges			-	-	0,06	0,03
18	Retribusi Izin Pdqqan & Perindstrian	0,09	0,11	0,09	0,07		0,09
19	Retribusi Pelayanan kes. Peserta Askes	0,06	0,05			2,63	0,40
20	Retribusi Pembuatan Bestek	2,56	1,11	1,91	2,68	0,01	1,41
21	Retribusi Perkwnn Kuda & Keur Kuda tarik	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,01
22	Retribusi SIUJK	0,04	0,03	0,06	0,03	0,33	0,07
23	Retribusi Penqujian Kendaraan Bermotor			0,31	0,29	0,37	0,10
24	Retribusi Izin Usaha Anqkutan			0,06	0,09	0,01	0,02
25	Retribusi Kin Pelayanan Keshtn Swasta		0,01		0,01		0,00
III	HASIL PERS.MIUK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2,96	4,83	4,00	9,00	9,00	4,81
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	66,69	68,20	76,63	70,02	78,92	68,32
	TOTAL PAD	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPPKA Kota Solok

4.5. Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Solok merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai macam kegiatan pembangunan di era otonomi daerah. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemda terutama di bidang keuangan daerah untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah, sebab kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dirancangnya sendiri merupakan indikator penting untuk terlaksananya otonomi daerah. Di samping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan asas desentralisasi, maka subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat pun mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada daerah diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah betul-betul dituntut agar mampu membiayai operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka masing-masing Pemda perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan dan sistem manajemen keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparansi dan akuntabel selama ini memang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Indonesia masih sangat kecil dan bahkan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Indonesia masih sangat kecil dan bahkan hanya sekitar 9 persen dari seluruh penerimaan Negara (Devas,1988) rendahnya penerimaan PAD ini merupakan indikasi yang nyata mengenai masih besarnya tingkat ketergantungan Daerah kepada Pusat terhadap pembiayaan pembangunan. Namun demikian bukanlah berarti bahwa daerah tertentu tidak mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan PAD nya.

Pada beberapa daerah perkotaan yang memiliki perkembangan ekonomi dan usaha yang cukup pesat sudah tentu memiliki potensi penerimaan PAD yang cukup besar untuk digali, dikelola dan dikembangkan dimasa datang, akan tetapi banyak para ahli mengemukakan bahwa rendahnya penerimaan PAD adalah disebabkan karena daerah tersebut tidak memiliki SDA yang cukup. Padahal salah satu faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD terutama di daerah Kota dan Kabupaten adalah karena masih rendahnya kinerja administrasi penerimaan daerah. Disamping itu keterbatasan kemampuan SDM dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang potensial juga sebagai faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Selanjutnya sistem dan prosedur penerimaan retribusi dan yang baik jelas akan mendorong dan mempercepat proses penerimaan PAD yang besar. Situasi administrasi penerimaan Daerah Kota Solok secara umum diduga tidak akan jauh berbeda dengan kondisi daerah Kota lainnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih besarnya tingkat ketergantungan Daerah terhadap bantuan dari pemerintah Pusat.

Sebagai salah satu Daerah Kota di Indonesia. Pemda Kota Solok telah berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Akan tetapi jumlah penerimaan PAD tersebut ternyata masih relative rendah bila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peranan PAD terhadap APBD tampaknya mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Namun demikian peranan PAD terhadap APBD masih relatif kecil, meskipun peranan tersebut memperlihatkan kecenderungan yang meningkat secara terus menerus pada tahun 2007 peranannya mencapai sebesar 6,21 % dan kemudian secara berangsur-angsur meningkat menjadi 6,72 % di tahun 2008. Pada tahun 2009 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Solok telah mencapai 7,50%. Terjadinya penurunan peranan PAD terhadap APBD tersebut bukanlah indikator yang menunjukkan kinerja pengelolaan PAD, namun karena peningkatan APBD yang jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan penerimaan PAD. Pada tahun 2011 tersebut APBD mengalami pertumbuhan sebesar 15,01 %, sedangkan PAD hanya bertumbuh sebesar 7,55 % saja. Sedangkan secara rata-rata dari tahun 2007 hingga 2011 peran PAD terhadap APBD adalah sebesar 6,85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Solok

TAHUN	PAD	APBD	RATIPADThdp APBD(%)
2007	8.546.776.244,54	127.127.093.823,46	6,72
2008	10.156.844.818,82	181.233.625.366,33	5,60
2009	17.383.801.204,02	218.562.002.777,67	7,95
2010	18.677.703.763,46	263.180.281.208,71	7,10
2011	21.633.583.410,19	288.513.101.352,45	7,50
		Rata-rata	6,85

Sumber: DPPKA Kota Solok

Kontribusi Retribusi Daerah memiliki peran yang cukup besar terhadap PAD di Kota Solok selama 5 tahun terakhir ini. Kontribusi Retribusi terhadap total PAD secara rata-rata dalam lima tahun terakhir ini adalah sebesar 20,22%. Kontribusi retribusi daerah ini lebih besar daripada kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD yang hanya mencapai sebesar 9,13%.

Sedangkan untuk kontribusi Pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Kontribusi Retribusi Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Terhadap Retribusi di Kota Solok Tahun 2007 - 2011

Tahun	Retribusi parkir	Total Retribusi Daerah	Kontribusi
2007	62.164.167	2.610.767.000,-	4.09%
2008	63.171.145	2.893,554.000,-	4.58%
2009	63.018.000	3.210.974.000,-	5.09%
2010	87.217.000	3.567.682.000,-	4.09%
2011	401.612.000	3.998.996.000,-	9,95%

Sumber: DPPKA Kota Solok

Jenis retribusi yang memiliki kontribusi yang cukup besar ini yakni retribusi Parkir ditepi jalan umum, khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2011 dikarenakan pada tahun tersebut perubahan kebijakan pengelolaan parkir yang tadinya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sekarang sudah dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan. Besarnya penerimaan jenis retribusi ini antara lain dikarenakan Kota Solok adalah kota persinggahan ke luar daerah disamping Kota Solok sebagai kota perdagangan dan jasa. Retribusi daerah merupakan salah satu pos penerimaan daerah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Pada hakikatnya, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya aktifitas perekonomian dan jasa. Apabila kondisi perekonomian dan jasa masih belum memungkinkan, maka pemungutan pajak dapat ditangguhkan. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan potensi retribusi daerah adalah dengan menciptakan iklim perekonomian dan jasa yang kondusif dalam suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah sendiri yang potensial adalah retribusi parkir, mengingat bahwa keadaan Kota Solok semakin menunjukan suatu mobilitas sosial

yang makin tinggi. Hal ini berarti jasa perparkiran semakin mendapat peluang yang lebih besar untuk ditingkatkan. Pengembangan jasa perparkiran ini bagi Kota Solok merupakan salah satu aspek yang mudah untuk dikembangkan, karena alasan tersedianya lahan yang relative tidak terbatas, makin majunya kehidupan kota, sehingga diasumsikan kehidupan kota bahwa pengembangan usaha perparkiran dapat ditumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran maka perlu adanya instansi pemerintah yang melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perparkiran agar dapat menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di Kota Solok.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor. 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok, maka dirasa perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok Nomor 54 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Dilingkungan Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok bahwa tugas pokok dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas maka untuk wilayah perparkiran ditepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

4.6. Gambaran umum Dinas Perhubungan

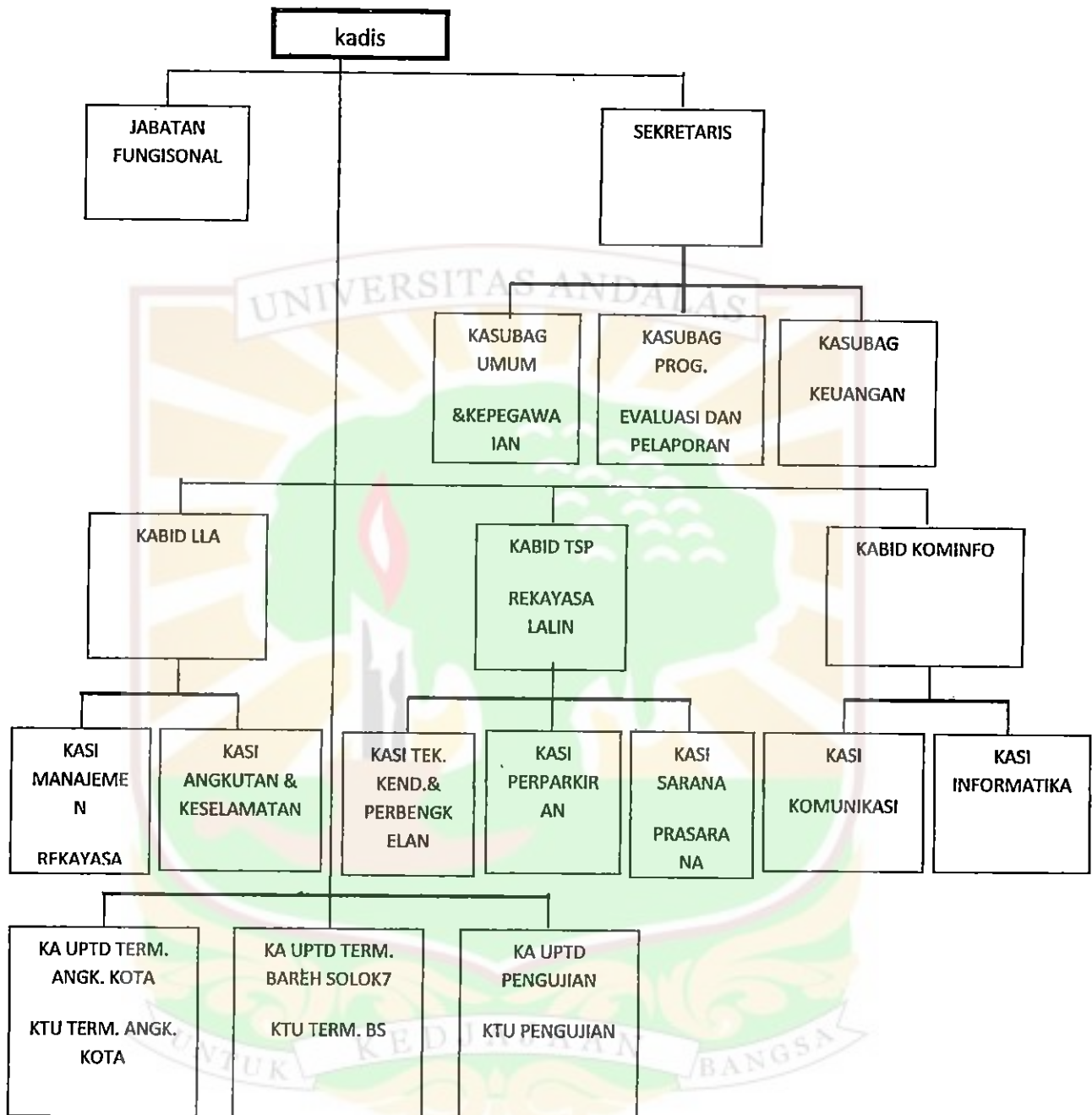
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok merupakan salah satu unsur pelaksana penyelenggaraan di bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika di wilayah Kota Solok, memiliki tugas membantu Walikota

dalam menyelenggarakan otonomi daerah, salah satunya yaitu penyelenggaraan retribusi di bidang perhubungan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan konsep desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok memiliki kantor yang berlokasi di wilayah pusat Kota yaitu di jalan Nasir sutan Pamuncak, yakni pada lokasi lintas Sumatera dan berada tepat didepan terminal Bareh Solok, sehingga memudahkan koordinasi dengan UPTD Terminal

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok memiliki visi yaitu: ***mewujudkan sistem transportasi yang handal sistem transportasi yang terpadu, beraksesibilitas tinggi, aman, nyaman, teratur, cepat dan terjangkau oleh masyarakat.***

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok sesuai dengan Perda Nomor. 6 tahun 2008 bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Solok



Jumlah Karyawan Dinas Perhubungan

Karyawan pada Dinas Perhubungan ini berjumlah 92 orang, sedangkan khusus untuk pengelolaan parkir serta pengawas parkir yang menjadi staf pengelola Kasi Perparkiran yakni sebanyak 7 orang yang ditugaskan sebagai pengelola, pengawas dari pengelolaan perparkiran.

Pengelolaan perparkiran

Pengelolaan perparkiran yang ada ditepi jalan umum merupakan kewenangan Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok ,yang merupakan tugas dari Kepala Seksi Perparkiran yang berada pada Bidang Teknik Sarana dan prasarana. Untuk Seksi Perparkiran staf yang bertugas mengenai perparkiran yakni sebagai Pengawas dari kinerja juru parkir. Seksi perparkiran mempunyai hak dan wewenang mengangkat dan memberhentikan juru parkir sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan.

Pengelolaan perparkiran pada awalnya dikelola oleh pihak ketiga, hal ini dengan harapan agar angka target retribusi parkir dapat dihitung setiap tahunnya. Tetapi kenyataannya dilapangan kurangnya pendapatan retribusi parkir yang diterima karena masih banyak pihak ketiga yang tidak membayar retribusi parkir sesuai dengan perjanjian kerjasama. Berangkat dari permasalahan ini lah pengelolaan retribusi dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan menunjuk juru parkir langsung dalam penerimaan retribusi parkir ini.

4.7 Pengelolaan Retribusi Parkir dan Perkembangan Penerimaan

4.7.1 Pengelolaan Retribusi Parkir

Pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Solok oleh Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu parkir ditepi jalan umum (*On Street Parking*) merupakan kegiatan parkir yang dilakukan dengan memanfaatkan tepi jalan umum sebagai media kegiatan parkir di luar tepi jalan umum (*Off Street Parking*) adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media lahan terbuka ataupun gedung yang khusus dibangun sebagai penunjang pokok usaha perparkiran

Potensi pengelolaan penerimaan retribusi parkir dapat menjadi sumber penerimaan PAD, hal ini merupakan konsep dasar sistim dan pengelolaan pajak dan retribusi termasuk pengelolaan retribusi parkir. oleh faktor internal pengelolaannya dan faktor eksternal. Artinya potensi penerimaan retribusi parkir yang besar saja belum merupakan jaminan untuk terealisasi sebagai sumber penerimaan PAD yang besar pula, bila kedua faktor tersebut didalam pengelolaannya tidak terlaksana secara optimal

Sistim dan Adminitrasi Pengelolaan Retribusi Parkir

Sistim dan Adminitrasi pengelolaan Retribusi Parkir meliputi :

1. Penetapan Tarif

Penetapan harga tarif parkir oleh pemerintah dianggap sebagai metode yang bisa digunakan dalam pengendalian dan pelayanan parkir. Penetapan harga dapat

Penetapan harga tarif parkir oleh pemerintah dianggap sebagai metode yang bisa digunakan dalam pengendalian dan pelayanan parkir. Penetapan harga dapat diberlakukan secara umum dapat juga untuk jenis pelayanan tertentu, pemerintah juga dapat menetapkan tarif diskriminatif untuk pelayanan yang sama dan pemerintah juga dapat mengizinkan beroperasinya parkir dengan pelayanan yang lebih baik dengan tarif yang lebih tinggi.

Pertimbangan yang perlu diambil oleh Pemerintah daerah dari retribusi parkir ini adalah bagaimana menetapkan tarif parkir yang paling tepat, tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat diterapkan tarif parkir yang paling optimal, sehingga retribusi parkir ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas perhubungan ditetapkan tarif sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tarif Retribusi Parkir

No	Jenis kendaraan	Perda No.11 tahun 2002	Perda No.5 tahun 2008
1.	Kendaraan Roda dua	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
2.	Kendaraan Roda tiga	Rp. 700,-	Rp. 1.000,-
3.	Kendaraan Roda empat	Rp. 800,-	Rp. 2.000,-
4.	Kendaraan roda enam	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-

Sumber : Data dari Dinas Perhubungan Kota Solok

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa terdapat perbedaan tarif antara Perda yang lama dengan Perda yang baru, tetapi untuk pemungutan Retribusi Parkir ini harga retribusi parkir untuk ditepi jalan umum sudah diterapkan harga pemungutan retribusi parkir semenjak 1 Maret 2008, sedangkan untuk implemetasi Perda tersebut secara keseluruhan baru diterapkan pada tahun 2011.

Dalam penetapan tarif retribusi parkir menurut Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi dikatakan bahwa tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat diterapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan kelancaran lalu lintas, dalam hal ini keputusan menteri Perhubungan No. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan, satuan biaya untuk fasilitas penyelenggaraan parkir dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu, tarif retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus yang disediakan, jangka waktu dan jenis kendaraan bermotor.

Dalam penetapan tarif retribusi parkir sebaiknya berdasarkan kepada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka

memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggara pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2. Pendataan / Identifikasi

Pendataan / Identifikasi merupakan pengecekan secara langsung terhadap objek dan subjek retribusi parkir.

Untuk objek retribusi parkir merupakan titik lokasi parkir yang ada ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok

Untuk objek dan subjek pengelolaan retribusi parkir dapat digambarkan seperti tabel berikut :

Tabel 4.7
Objek dan Subjek Retribusi Parkir

No	Objek parkir	Sabjek parkir	
		Dengan pihak ketiga (sebelum diterapkanya Perda)	Dengan juru parkir (setelah diterapkan Perda)
1	Cemerlan Photo	Afriyanti	Minang
2	Solinda	Almi PU	Martius
3	Bk.Barat	Edwin Ridar	Joni, boy
4	Bk.Timur	Elpatri pendek	Dodi, ril
5	Eks.Lapas	Nasrul	Yulibardiman
6	Eks.Toko mini	Muharami	Ahmad, erwin
7	Winjaya	Sidik	Arzanus
8	Kosmetik Ananda	Noviyardi	Nov
9	Pangkas Tambut	Iklas	Kevin
10	Pasar Tahap IV	Zamzami	Yus
11	Kantor Pos Lama	Dedi, W	Yusmaniar
12	Rm.Simp.Raya	Abdi	Dafidaryeni
13	Sinar Listrik/Guci	Furgan	Eriyandri

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok

Untuk pendataan/ indentifikasi sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 tahun 2008, maka pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum dikelola oleh Pihak ketiga dengan mengadakan surat perjanjian kerjasama dalam pengelolaan parkir, dengan penetapan target penerimaan PAD dari retribusi parkir.

Sedangkan pengelolaan retribusi parkir setelah diterapkannya Perda Nomor 5 tahun 2008 pengelolaan retribusi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan yakni dengan menunjuk juru parkir dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. pengisian dan penandatanganan surat permohonan sebagai juru parkir
- b. menyerahkan fotocopy identitas dan pasphoto
- c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan tugas juru parkir
- d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama pemerintah kota
- e. mencantumkan lokasi lahan parkir

3. Penaksiran Retribusi

Menurut teorinya Penaksiran retribusi terbagi dua yakni :

- Menghitung retribusi parkir sendiri (self assesent)
- Penaksiran oleh Dinas Perhubungan (official assessment)

Penaksiran retribusi memang belum dilakukan melalui perhitungan retribusi sendiri, untuk Penaksiran Retribusi parkir di Kota Solok berdasarkan Official assessment.

4. Penetapan Target

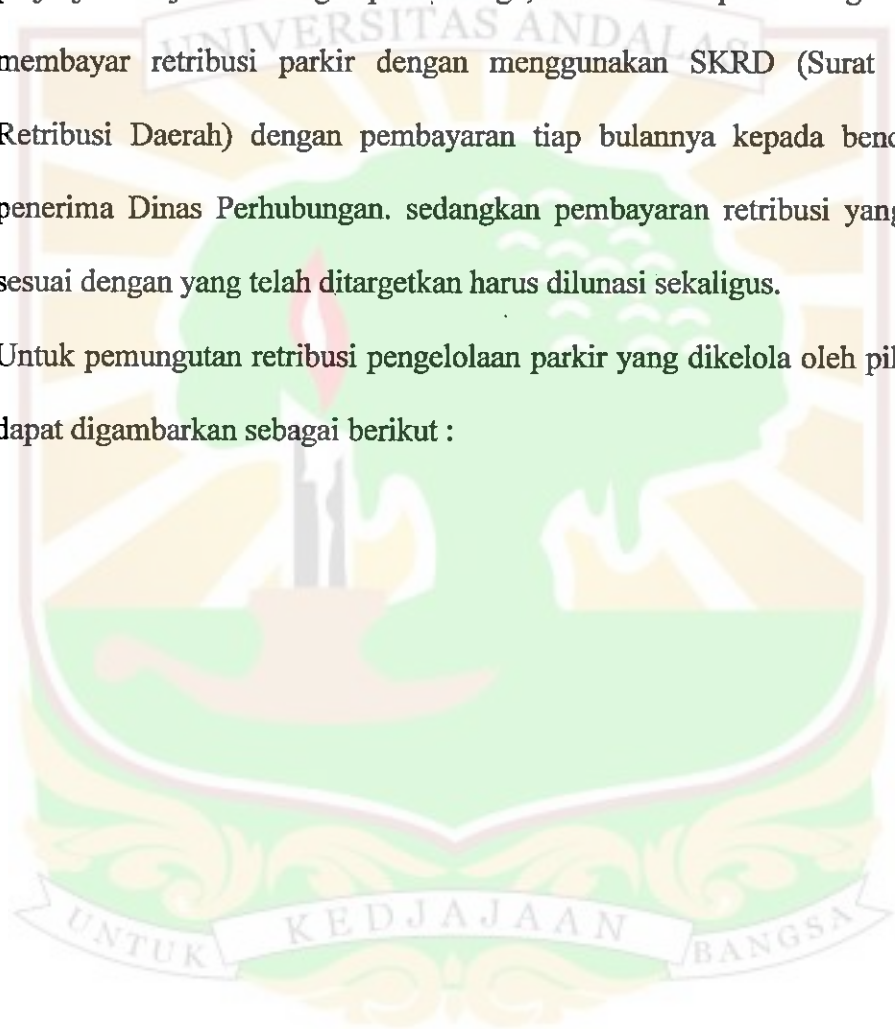
Secara teori Penetapan target haruslah didasarkan pada potensi yang ada, bila tidak maka target yang ditetapkan mungkin saja jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Kalau hal itu dilakukan dalam pengelolaan PAD sebagaimana yang terjadi selama ini, maka meskipun realisasi penerimaan melebihi dari target atau diatas 100%, namun realisasi penerimaan tersebut sebenarnya masih jauh lebih rendah dari potensi yang ada.

Perhitungan potensi retribusi parkir yang dilakukan uji petik/ uji hasil oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada tahun 2010. Dalam penetapan target ini seharusnya digunakan untuk menganalisis sistim pengelolaan dengan pihak ketiga, karena dengan pengelolaan pihak ketiga seharusnya dapat membayar retribusi sesuai dengan penetapan target, tetapi didalam pelaksanaanya pihak ketiga selalu membayar retribusi parkir dibawah target, hal ini terkesan seolah-olah kelemahan dari Pemda yang tidak menetapkan target dengan baik sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.

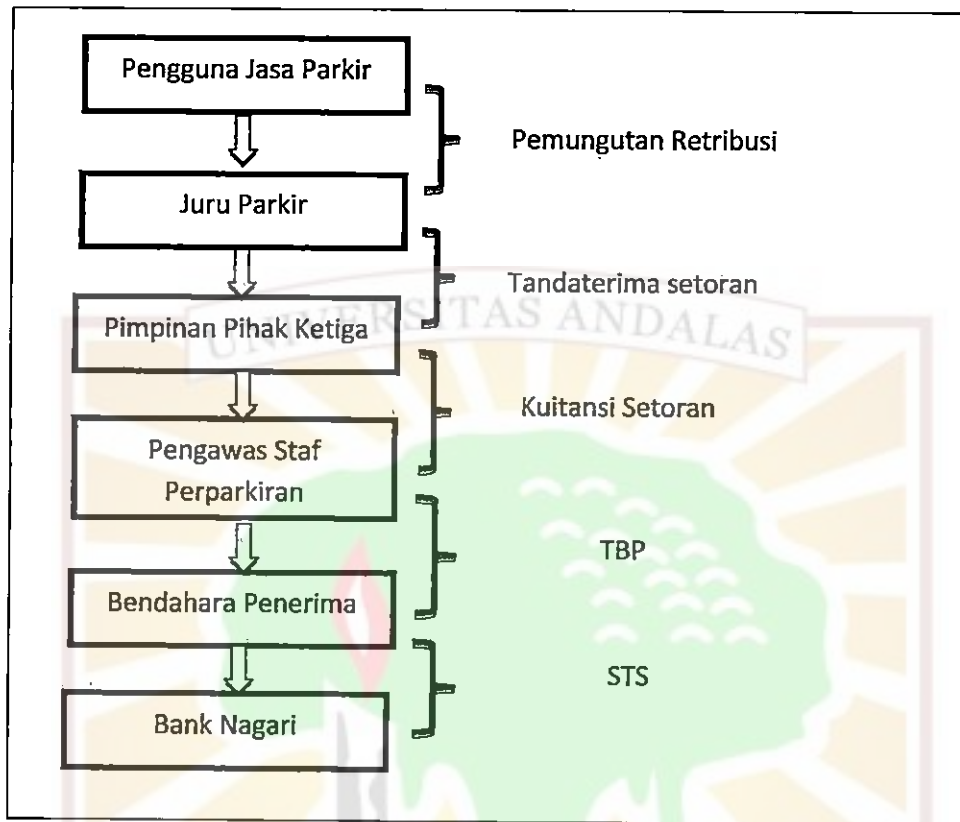
5. Pemungutan dan Pembayaran

Pemungutan dan Pembayaran retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 pada pasal 11 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa “pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan” maka untuk pelaksanaan Pengelolaan Retribusi dilaksanakan dengan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga diharapkan membayar retribusi parkir dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dengan pembayaran tiap bulannya kepada bendaharawan penerima Dinas Perhubungan. sedangkan pembayaran retribusi yang terutang sesuai dengan yang telah ditargetkan harus dilunasi sekaligus.

Untuk pemungutan retribusi pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2
Alur Pemungutan Retribusi Perparkiran yang dikelola oleh pihak ketiga



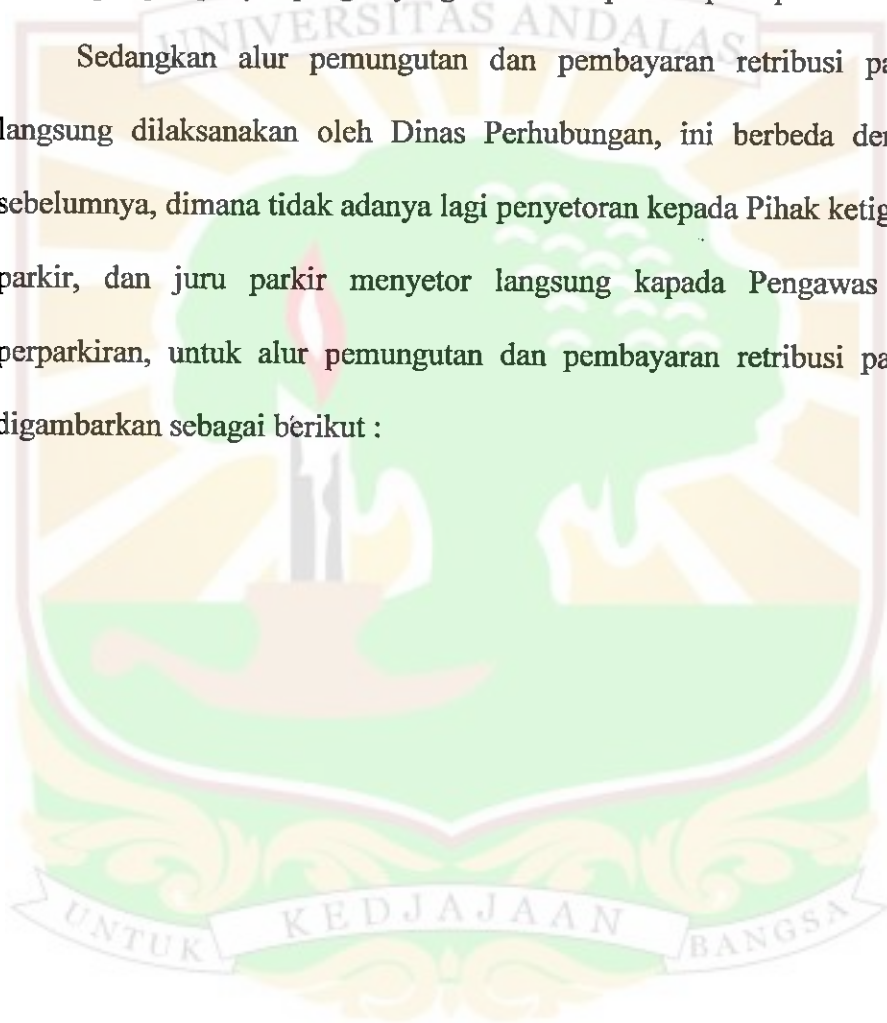
Sumber dari : Dinas Perhubungan Kota Solok

Dari gambar diatas menceritakan alur penerimaan retribusi dimulai dari pengguna jasa parkir yang memakai jasa parkir membayar retribusi parkir ke juru parkir dengan menerima karcis sebagai alat bukti pembayaran, kemudian juru parkir menyerahkan retribusi parkir ke pimpinannya yakni pihak ketiga dengan memakai tanda terima setoran, kemudian pihak ketiga menyerahkan retribusi parkir kepada pengawas/ Staf perparkiran dengan menggunakan kuitansi setoran dan staf parkir menyerahkan kepada bendahara penerima dinas Perhubungan dengan menggunakan bukti setoran yang disebut TBP (Tanda

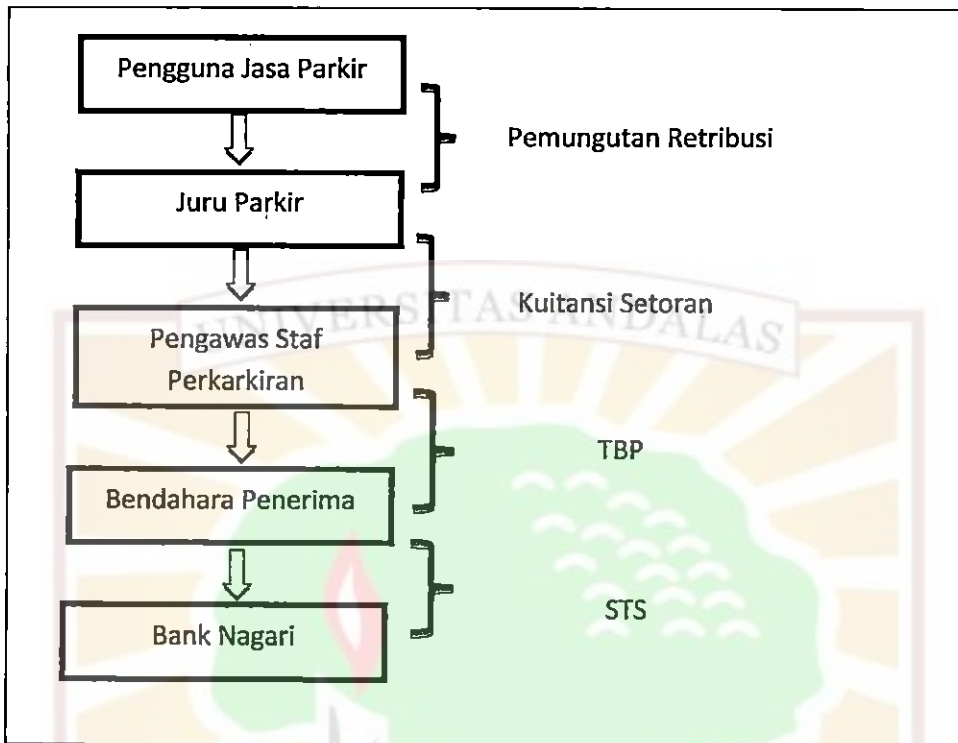
Bukti Penyetoran), dan terahir bendahara penerima menyerahkan ke bank dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran) sebagai bukti pembayaran penerimaan retribusi parkir dari sektor perparkiran Dinas Perhubungan.

Pengelolaan Retribusi Parkir yang dikelola oleh Pihak ketiga ini sebenarnya bisa efektif kalau dikelola dengan baik, artinya tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang telah ditetapkan kepada pihak ketiga.

Sedangkan alur pemungutan dan pembayaran retribusi parkir yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, ini berbeda dengan yang sebelumnya, dimana tidak adanya lagi penyetoran kepada Pihak ketiga dari juru parkir, dan juru parkir menyetor langsung kepada Pengawas atau staf perparkiran, untuk alur pemungutan dan pembayaran retribusi parkir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.3
Alur Pemungutan Retribusi Perparkiran Setelah Penerapan Perda



Sumber dari : Dinas Perhubungan Kota Solok

Untuk pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, sebenarnya hampir sama dengan yang dikelola oleh pihak ketiga, tetapi disini yang membedakan bahwa juru parkir langsung menyerahkan penerimaan retribusi langsung ke Dinas Perhubungan, dan itu dilakukan setiap hari. Dalam hal ini pengelolaan retribusi sangat efisien dan efektif

6. Sistim Pencatatan dan Pelaporan

Sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008, sistem pencatatan dan pelaporan mengenai retribusi Parkir ini dicatat dan dilaporkan setiap akhir bulan setelah penyetoran dari pihak ketiga.

Sedangkan setelah diterapkannya Perda, maka sistim pencatatan dan pelaporan dilakukan setiap hari oleh Pengawas Parkir /Staf parkir ke bagian pencatatan dan pelaporan bendaharawan penerima pada dinas Perhubungan.

Dalam pencatatan dan pelaporan sebaiknya dilakukan setiap hari dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadahan bagi pengelola retribusi parkir.

7. Pengawasan

Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk mengurangi tingkat kebocoran dan penyimpangan pengelolaan pendapatan, tetapi diarahkan untuk menciptakan tindakan aparaturnya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan bersih. Dengan adanya pengawasan akan memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi bagi petugas lapangan untuk bekerja secara optimal

Perbedaan Pengelolaan Retribusi Parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan adalah adanya pengawasan langsung terhadap juru parkir untuk penerimaan retribusi parkir dari pengguna jasa parkir, sehingga mengurangi tingkat kecurangan dalam penyetoran retribusi parkir, sedangkan yang dikelola oleh Pihak ketiga yakni kurangnya pengawasan tersebut karena

adanya kepentingan-kepentingan politik dalam pengelolaan retribusi parkir dari pihak ketiga tersebut.

8. Pemaksaan dan Penetapan sanksi

Pelaksanaan dan penetapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dapat mendorong kesadaran untuk melunasi kewajibannya. Untuk penetapan sanksi pengelolaan retribusi parkir yang menyebabkan kurangnya pendapatan retribusi parkir belum sepenuhnya dilaksanakan, sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 tahun 2008, pihak ketiga belum maksimal dalam pembayaran retribusi seperti dalam perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa kurangnya pendapatan retribusi parkir dari pihak ketiga akan diberikan sanksi dengan teguran serta pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Solok telah melakukan beberapa kali teguran kepada pihak ketiga. Sedangkan untuk pengelolaan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui juru parkir, jika tidak mencapai target penerimaan retribusi maka akan diadakan penggantian juru parkir

Sebaiknya penetapan sanksi harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada

9. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan SDM pengelola retribusi sangat menentukan peningkatan pendapatan, karena itu kualitas dan kuantitas pengelolaan retribusi yang memadai haruslah diupayakan salah satunya yakni menempatkan tenaga yang

memiliki kemauan dan kemampuan serta motivasi yang tinggi untuk meningkatkan retribusi perparkiran.

Untuk peningkatan kemampuan SDM juru parkir, Dinas Perhubungan selalu mengadakan pelatihan mengenai Juru Parkir, pelatihan juru parkir ini dilakukan setiap tahun, dengan peserta yakni dari juru parkir yang ada di Kota Solok, pelatihan juru parkir ini bertujuan untuk memberikan bekal ilmu, motivasi serta dorongan untuk peningkatan retribusi dibidang perparkiran, pemahaman akan pentingnya peningkatan PAD dari sektor perparkiran untuk kelancaran pembangunan, serta tak kalah pentingnya mengenai pelayanan jasa bagi pengguna jasa parkir dalam pemungutan retribusi ini.

Sedangkan untuk pelatihan juru parkir ini tidak diikuti oleh Pengelola Juru Parkir, sehingga menyebabkan kurangnya SDM bagi pengelola Parkir tersebut, hal ini lah yang menyebabkan salah satu rendahnya penerimaan PAD karena belum ada nya pemahaman dari pengelola parkir tentang pentingnya peningkatan retribusi parkir bagi kesinambungan pembangunan.

4.7.2. Perkembangan Penerimaan

Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2007 – 2010 diterapkan sesuai target yang telah ditentukan, dengan melihat beberapa potensi lokasi parkir yang ada, untuk melihat berapa target penerimaan Retribusi Parkir, maka terlebih dahulu dihitung potensi retribusi parkir tersebut.

1. Potensi Retribusi Parkir

Penaksiran Retribusi Parkir yakni memperkirakan perhitungan Potensi retribusi parkir dengan melakukan survey langsung kelapangan dan pengujian hasil retribusi terhadap parkir kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), jam buka areal yaitu dari jam 9.00 s/d 15.00 wib, karena lokasi ditepi jalan umum biasanya akan dipakai oleh pedagang malam yang berjualan kakilima dipinggir jalan. Survey ini menyimpulkan keadaan lokasi parkir yang mana semakin dekat dengan lokasi pasar akan semakin banyak kendaraan yang parkir, survey dilakukan pada saat hari Selasa, yakni merupakan hari Pasar (pusat keramaian pada Kota Solok) dengan melakukan survey selama 1 jam untuk kendaraan yang memakai lahan parkir di seluruh objek parkir.

Tabel 4.8
Potensi Retribusi Parkir Kendaraan

No	Lokasi	Jenis kendaraan	Potensi parkir
1	Cemerlang foto	Mobil	34.560.000
2	Solinda	Mobil	46.080.000
3	Bk.barat	Mobil	57.600.000
4	Bk.timur	Mobil	46.080.000
5	Eks lapaz	Rodadua	34.560.000
6	Eks toko mini	Rodadua	43.200.000
7	Win jaya	Rodadua	40.320.000
8	Kosmetik ananda	Rodadua	43.200.000
9	Pangkas rambut	Rodadua	37.440.000
10	Pasar tahap iv	Rodadua	34.560.000
11	Kantor pos lama	Rodadua	34.560.000
12	Rm.simpang raya	Mobil	46.080.000
13	Sinar listrik/guci	Rodadua	14.400.000
	Jumlah		Rp. 512.640.000

Hasil Analisa survey lokasi (Perhitungan terlampir)

2. Perbandingan Retribusi Parkir

Untuk pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir yang dilaksanakan dengan pihak ketiga pengadakan perjanjian dengan penentuan jumlah nilai penyeteran retribusi parkir, sedangkan untuk pengelolaan langsung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yakni dengan menunjuk langsung juru parkir sebagai pengelola parkir. jumlah nilai kontrak penyeteran retribusi parkir yang dilaksanakan dengan pihak ketiga dan jumlah penerimaan penyeteran retribusi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perbandingan Pengelolaan Retribusi Parkir yang dilaksanakan pihak ketiga
Dengan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

No	Lokasi Parkir	Penerimaan Parkir Pemda oleh Pihak Ketiga (nilai kontak th.2010)	Penerimaan Parkir Pemda (Realisasi 2011 Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan)
1.	Cemerlang Photo	Rp. 10.000.000,-	Rp. 32.318.000,-
2.	Solinda	Rp. 3.347.500,-	Rp. 23.693.000,-
3.	Bk. Barat	Rp. 6.875.000,-	Rp. 41.782.000,-
4.	Bk. Timur	Rp. 9.150.000,-	Rp. 30.067.000,-
5.	Eks.Lapas	Rp. 3.600.000,-	Rp. 10.570.000,-
6.	Win Jaya	Rp. 13.160.000,-	Rp. 41.491.000,-
7.	Toko mini	Rp. 4.700.000,-	Rp. 39.463.000,-
8.	Kosmetik Ananda	Rp. 3.600.000,-	Rp. 50.379.000,-
9	Pangkas Rambut	Rp. 4.585.000,-	Rp. 26.469.000,-
10	Pasar Tahap IV	Rp. 5.000.000,-	Rp. 33.414.000,-
11	Kantor Pos Lama	Rp. 7.300.000,-	Rp. 31.120.000,-
12	Rmh.makan Simp.Raya	Rp. 9.600.000,-	Rp. 32.249.000,-
13	Sinar Listrik/Guci	Rp. 6.600.000,-	Rp. 8.870.000,-
	Jumlah	Rp. 87.217.000,-	Rp. 401.612.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok

Dari perhitungan diatas, maka dapat dilihat perbandingan yang sangat tajam antara pengelolaan retribusi parkir, perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pihak ketiga dengan pengelolaan langsung oleh Dinas Perhubungan.

Perbedaan salah satunya adalah karna tidak ada lagi biaya/ honor yang dikeluarkan kepada pengelola pihak ketiga, dan honor juru parkir langsung dikelola oleh Dinas Perhubungan dan dibayarkan sesuai dengan upah minimum standar pekerja Untuk pengelolaan Retribusi parkir yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ini, melalui juru parkir secara tidak langsung telah menimbulkan biaya-biaya operasional kegiatan, seperti honor juru parkir dan pengawas parkir yang langsung turun kelapangan. Hal ini tertampung didalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) tahun 2011 pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solok, dalam anggaran Bidang Pendapatan Retribusi. Honor yang diterima diberikan hanya selama 3 (tiga) bulan, karena Penerapan retribusi parkir ini merupakan percobaan awal dari implementasi Perda tersebut. Dan untuk selanjutnya, honor yang dibayarkan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan hanya untuk juru parkir sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan, dan target yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan harus tercapai atau setidaknya mendekati dari angka target. Sedangkan apabila juru parkir yang menyeter retribusi parkir kurang dari target, maka juru parkir tersebut akan diganti dengan juru parkir yang lain yang lebih jujur dan transparan.

4.8. Analisa Pengelolaan Retribusi Parkir dan perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkannya Perda No 5 tahun 2008

Dari pembahasan sebelumnya untuk menggambarkan perkembangan dan penerimaan retribusi parkir secara khusus, maka dapat dianalisa dengan membandingkan pengelolaan retribusi parkir sebelum dan sesudah diterapkannya Perda nomor 5 tahun 2008 sebagai berikut :

Ada beberapa item dalam sistim dan administrasi pengelolaan retribusi parkir yang tidak mengalami perubahan dari pengelolaan sebelum dan setelah dilaksanakan Perda nomor 5 tahun 2008 seperti :

1. Penetapan tarif yang sama sebelum dan setelah adanya Perda pada tahun 2008
2. Objek lokasi lahan parkir yang sama dalam penungutan retribusi

Sedangkan untuk perkembangan penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga berfluktuasi dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meningkat.

Ada beberapa perbedaan dari penaksiran retribusi, penetapan target, pemungutan dan pembayaran, sistim pencatatan dan pelaporan serta pengawasan, maka dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10
Sistim dan Administrasi Pengelolaan retribusi parkir sebelum dan setelah diterapkan Perda

No	Sistim dan administrasi pengelolaan retribusi parkir	Sebelum diterapkannya Perda	Setelah diterapkannya Perda
A.1	Pendataan/Identifikasi Yakni mengenai subjek pengelolaan retribusi	Dikelola oleh pihak ketiga	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
2	Penaksiran retribusi	Melihat tingkat kepadatan dan posisi lokasi parkir	Mendekati angka potensi retribusi parkir
3	Penetapan target	Realisasi penerimaan tahun lalu	Sesuai potensi retribusi parkir (mendekati)
4	Pemungutan dan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak langsung mengontrol dan mengawasi juru parkir 2. Kurangnya pengawasan mengenai penerimaan retribusi parkir sesuai dengan potensi yang ada 3. Adanya ketetapan penerimaan retribusi parkir tiap tahunnya 4. Tidak efisien dan efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung mengontrol dan mengawasi juru parkir 2. Pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas perhubungan 3. Belum adanya angka yang jelas dari penetapan retribusi parkir 4. Sangat efisien dan efektif
5	Sistim pencatatan dan pelaporan	Dicatat dan dilaporkan setiap ahir bulan	Dicatat dan dilaporkan setiap hari
6	Pengawasan	Kurang intensif	Sangat intensif
7	Pemaksaan dan penetapan sanksi	Penetapan sanksi dengan teguran	-
B	Perkembangan Retribusi Parkir	Fluktuasi	Meningkat

Dari pembahasan tersebut diatas terlihat bahwa pengelolaan retribusi parkir oleh masing-masingnya mempunyai kelebihan. Untuk pengelolaan parkir yang dikelola oleh Pihak ketiga yakni dapat mengetahui angka pasti dari pemungutan retribusi pengelolaan parkir tiap tahunnya, sedangkan angka pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan belum dapat dipastikan penetapan target retribusi nya, akan tetapi penetapan retribusinya diusahakan mendekati angka potensi pada masing-masing lokasi parkir tersebut, karena pengelolaan retribusi parkir yang baik tergantung dengan sistim pengendalian interen yang ada pada Dinas tersebut, apakah bisa mengatur, mengontrol serta mengawasi jika terjadi penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir ataupun staf perhubungan, sehingga Pendapatan Retribusi dari Pengelolaan Parkir ditepi jalan umum ini lebih meningkat.

4.9. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Dalam pengelolaan retribusi parkir, sebelum dan setelah diterapkannya Perda Nomor. 5 tahun 2008 maka terjadi perbedaan capaian target. Walaupun Perda Retribusi telah ditetapkan pada tahun 2008, tetapi untuk implementasinya belum dilaksanakan sampai dengan tahun 2010, hal ini dikarenakan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengikuti dari retribusi tersebut, seperti permintaan dari Anggota Dewan yang mempunyai kepentingan pada saat itu, karena ditahun 2008-2010 terjadi persiapan kampanye pemilihan anggota legislative dan kepala Daerah. Maka dari itu Perda tersebut baru bisa terimplementasikan dan terlaksana

pada tahun 2011 ini.

Untuk melihat manakah yang lebih efisien dan efektif pengelolaan parkir di Kota Solok sebelum dilaksanakannya Perda retribusi Pengelolaan parkir ini dengan telah dilaksanakannya Perda Retribusi ini, untuk itu penulis mencoba membandingkan data dari pengelolaan parkir yang sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 dengan yang telah diterapkannya Perda tersebut, untuk itu data yang diambil adalah data dari tahun 2009 s/d 2011

Analisis Efisiensi

Pengukuran efisiensi penerimaan Retribusi Parkir dilakukan dengan membagi biaya dengan realisasi Retribusi Parkir. Untuk biaya yang ditimbulkan dari retribusi parkir ini adalah dari Pelatihan Juru Parkir yang ada di Kota Solok. Untuk biaya langsung pemungutan retribusi ini dibayarkan berdasarkan sesuai dengan standar upah pegawai minimum sebesar Rp. 50.000,/hari yang berasal dari pemungutan retribusi yang dilakukan di lokasi titik parkir tersebut. Sedangkan dari Pemerintah sendiri dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Solok melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber daya Manusia dari Juru parkir tersebut. Sedangkan kegiatan Fisik dari Pengelolaan Parkir yakni diadakannya Pengecatan marka jalan khusus parkir yang ada di sekitar lokasi pasar raya ditepi jalan umum. Tingkat Efisiensi pemungutan retribusi parkir ini diperoleh dengan cara membagi biaya administrasi pemungutan dengan realisasi penerimaan dan dikali dengan 100%

Tabel 4.11
Persentase Efisiensi Pengelolaan Retribusi Parkir

Tahun	Persentase (%)	Kriteria Efisiensi
2008	132,25 %	Tidak efisien
2009	66,57 %	Cukup Efisien
2010	49,98 %	Efisien
2011	37,61 %	Sangat efisien

Sumber : Hasil Analisa Pengeolahan data (terlampir)

Dari analisa persentase efisiensi pengelolaan retribusi parkir menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi parkir dengan kerjasama pihak ketiga menunjukkan angka realisasi besar > dari 40% - 100%, artinya pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga ini tidak efisien.

Sedangkan pengelolaan parkir setelah dilaksanakannya Perda Nomor 5 tahun 2008 menurut hasil perhitungan menunjukkan angka 37,61% (< 40%) artinya pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sangat efisien bila dibandingkan saat kerjasama dengan pihak ketiga

Analisis Efektivitas

Efektifitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu retribusi dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Data target dan realisasi pungutan retribusi Parkir selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 dibawah ini tabel 4.6 menggambarkan perhitungan efektivitas penerimaan Retribusi Parkir di Kota Solok

Tabel .4.12
Tingkat Persentase (%) Efektivitas Retribusi Parkir Kota Solok
Tahun 2008-2011

Tahun	Persentase Efektifitas	Kriteria Efektifitas
2008	12%	<40 % = tidak efektif
2009	12%	<40 % = tidak efektif
2010	17%	<40 % = tidak efektif
2011	78%	40% - 80% = efektif

Sumber : Analisa Pengolahan Data (terlampir)

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas menunjukan angka < 40% dan tidak efektif dari tahun 2008 s/d 2010, karena pengelolaan parkir dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga, sedangkan tahun 2011 sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2008 menunjukan pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum lebih efektif dibandingkan dengan saat kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil perhitungan menunjukan angka sebesar 78% (> 40%) hal ini berarti pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum efektif bila dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok, walaupun angka nya belum mencapai target dari yang telah dianggarkan sesuai dengan potensi yang ada, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh dinas Perhubungan cukup memuaskan pencapaian hasil target dari retribusi parkir dibandingkan dengan sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penyimpulan ahir tentang Analisa Pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum yakni :

1. Pengelolaan Retribusi parkir sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 adalah dengan mengadakan kerjasama Pihak ketiga. Pembayaran retribusi Parkir dilakukan tiap bulan melalui sistem pemungutan serta pembayaran retribusi yang lebih panjang prosesnya dari juru parkir ke pihak ketiga. Sedangkan setelah diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 Penerimaan Retribusi Parkir langsung dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan dengan proses penerimaan retribusi parkir dilakukan setiap hari oleh Dinas Perhubungan.
2. Perkembangan penerimaan Retribusi Parkir setelah diterapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 lebih meningkat, dibandingkan sebelum diterapkannya Peraturan Daerah Kota Solok tersebut dengan penetapan tarif dan objek yang sama pada retribusi parkir ditepi jalan umum ini.
3. Kinerja pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Efektifitas dan Efisiensinya lebih baik karena adanya pengawasan yang intensif dibandingkan sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008

Saran

Agar pelaksanaan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan memperoleh hasil yang optimal, maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan dunia pendidikan adalah :

1. Pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok perlu lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang dengan cara melakukan pengawasan yang intensif agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan sehingga pengelolaannya semakin efektif dan efisien secara berkelanjutan
2. Untuk menghindari kebocoran penerimaan retribusi ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok maka bagian pencatatan dan pemungutan dipisahkan agar tidak terjadi fraud / kecurangan yang dilakukan antara bagian pencatatan dengan pemungutan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman (1987), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media sarana Press Jakarta.
- Alit, Sutayana Putu (2010), Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Parkir Pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Badung, *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* Vol 14, No.1, Januari 2010.
- Sufaeni, Dewi (2010) Tinjauan Atas Efektifitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan PAD Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Devas, Nick,al (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Datar (1996), Pedomen Teknis Penyelenggaraan Parkir.
- Enambe, Markus'Maxs (2006), Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Studi Kasus Kawasan Simpang Lima),Tesis Magister Ilmu Adminitrasi, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Fachanie, Meutia (2007), Analisis Efisien dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Selemam , Skripsi Universitas Diponegoro.
- Florida, Asha (2006), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara,Tesis Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara .
- Harapan, Aslan (2003), Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam mengelola Perparkiran Kaitannya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Hadi, Sutrisno (1993), *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Irfan, *Kebijakan Publik*, (1996),Universitas Terbuka Jakarta.
- Juliansyah, Elvi (2009) Analisis Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daeah Kota Sintang, *Jurnal Mandiri*,STKIP Persada Katulistiwa.
- Lutfi, Ahmad (2006), Penyempurnaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi*, Volume XIV, no.1 Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia .
- Mahmudi (2007), Manajemen Kinerja Sektor Publik,UPP STIM YKPN, Yokyakarta
- Mufli, Yamin (2011), *Jurnal Analisa Sistem Perparkiran Sebagai Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene*.
- Muam Ahmad (2011) Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,Mifaz rasam Publishing,Tanggerang.

- Pahlawardi, Denu (2011), Resume Retribusi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.
- Paiz, Ahmas,dkk (2010), Pembiayaan Pembangunan Teori dan Konsep Retribusi, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nofember,Surabaya.
- Prakosa, Kesit Bambang (2003), Pajak dan Retribusi Daerah,UII Pres,Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Retribusi Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi parkir ditepi jalan umum.
- Paraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2008 tentang Tempat Khusus parkir dan Parkir ditepi jalan umum.
- Sugiyono(2008) Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.Bandung;Alfabeta
- Saifudin, Ambia Muhamad,dkk (2010), Kajian Potensi dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan (on street parking) Kota Banda Aceh, **Jurnal Program magister Bidang Keahlian manajemen asset FTSP-Institut Teknologi sepuluh November, Surabaya.**
- Sumardi (2005) Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Parkir non Badan Jalan Kota Surakarta tahun 2004”**Jurnal Dinamika Vol.1 no.1 Mei 2005.**
- Suardi (2008) Analisis Karakteristik dan Dampak Parkir terhadap Lalulintas, Solo :Surakarta.
- Surami, Sri (2002) Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang : Tesis Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana Universtias Diponegoro Semarang.
- Solok Dalam Angka (2011), Bapeda Kota Solok.
- Santoso, Amir (1990), Pengantar Analisa Kebijakan Negara,Jakarta ; Renika Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah .
- UNAND, Studi Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok 2008 Pusat Studi Keuangan.
- Yani, Ahmad (2002), Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta ; Rajawali.

POTENSI PARKIR

NO	LOKASI PARKIR	AREA BUKA	LUAS LAHAN	JENIS KENDARA AN	RATA2 KEND. PARKIR /JAM	TINGKAT HUNIAN/ HR	TINGKAT HUNIAN/ BLN	harga tarif	RETRIBUSI PARKIR/BLN	RETRIBUSI PARKIR/THN
1	CEMERLANG FOTO	8 s/d 16	18	MOBIL	6	48	1.440	2.000	2.880.000	34.560.000
2	SOLINDA	8 s/d 16	24	MOBIL	8	64	1.920	2.000	3.840.000	46.080.000
3	BK.BARAT	8 s/d 16	26	MOBIL	10	80	2.400	2.000	4.800.000	57.600.000
4	BK.TIMUR	8 s/d 16	26	MOBIL	8	64	1.920	2.000	3.840.000	46.080.000
5	EKS LAPAZ	8 s/d 16	22	RODADUA	12	96	2.880	1.000	2.880.000	34.560.000
6	EKS TOKO MINI	8 s/d 16	25	RODADUA	15	120	3.600	1.000	3.600.000	43.200.000
7	WIN JAYA	8 s/d 16	24	RODADUA	14	112	3.360	1.000	3.360.000	40.320.000
8	KOSMETIK ANANDA	8 s/d 16	25	RODADUA	15	120	3.600	1.000	3.600.000	43.200.000
9	PANGKAS RAMBUT	8 s/d 16	20	RODADUA	13	104	3.120	1.000	3.120.000	37.440.000
10	PASAR TAHAP IV	8 s/d 16	18	RODADUA	12	96	2.880	1.000	2.880.000	34.560.000
11	KANTOR POS LAMA	8 s/d 16	18	RODADUA	12	96	2.880	1.000	2.880.000	34.560.000
12	RM.SIMPANG RAYA	8 s/d 16	20	MOBIL	8	64	1.920	2.000	3.840.000	46.080.000
13	SINAR LISTRIK/GUCI	8 s/d 16	15	RODADUA	5	40	1.200	1.000	1.200.000	14.400.000
									42.720.000	512.640.000

HASIL WAWANCARA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK

➤ Q = Kapan Pertama kali retribusi Parkir ini berlaku?

A = Retribusi ini berlaku semenjak 10 Januari 2011

➤ Q = Bagaimana perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir dari tahun 2008-2010?

A = Perkembangan retribusi parkir dari tahun 2008-2009 terjadi tunggakan, kemudian ditindaklanjuti dengan teguran baik lisan maupun tulisan. Pada tahun 2010 mulai meningkat dan tanpa tunggakan.

➤ Q = Berapakah jumlah kendaraan yang parkir di salah satu lokasi ?

A = Tergantung hari, kalau untuk hari Jumat dan Selasa yang merupakan hari pusat pasar keramaian "hari Balai" lebih banyak kendaraan yang parkir dari hari lainnya.

➤ Q = Apakah pernah dilakukan perhitungan potensi retribusi parkir langsung oleh Dishub?

A = Dari Dinas perhubungan belum secara maksimal dilakukannya, tetapi dari Dinas DPPKA sudah melakukan Uji Petik selama 3 bulan, dan memperoleh hasil nilai potensi jauh dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati

➤ Q = Adakah kendala saat perpindahan pengelolaan dalam pemungutan parkir dari pihak ketiga dengan dikelola sendiri?

A = Pada tahap awal pengelolaan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan mengalami kendala seperti sanggahan dari anggota dewan yang tidak yakin akan pengelolaan awal pemungutan oleh dinas perhubungan

➤ Q = Apakah saat ini pernah ditawarkan pengelolaan parkir dengan cara "ditender" dengan harga penawaran sesuai dengan potensi yang ada?

➤ A = Pernah ditawarkan, tetapi pihak ketiga tidak ada yang sanggup, karena yakin adanya "pembayaran adm" untuk pemenangan tender tersebut, hal ini menyebabkan lebih banyaknya biaya yang dikeluarkan dari penerimaan.

PERHITUNGAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

TAHUN	REALISASI RETRIBUSI PARKIR	POTENSI RETRIBUSI PARKIR	EFEKTIFITAS PARKIR (%)	KRITERIA EFEKTIFITAS
2008	63,171,145	512,640,000	12%	,40% = Tidak efektif
2009	63,018,000	512,640,000	12%	,40% = Tidak efektif
2010	87,217,000	512,640,000	17%	,40% = Tidak efektif
2011	401,612,000	512,640,000	78%	40%-80% = Efektif



PERHITUNGAN EFISIENSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

TAHUN	JENIS BIAYA	SATUAN BIAYA	TOTAL BIAYA	REALISASI RETRIBUSI PARKIR	EFISIENSI PARKIR (%)	KRITERIAN EFISIENSI
2008	1. Pelatihan Juru Parkir	40,130,000	83,544,000	63,171,145	132.25	Tidak Efisien
	2. Pengadaan Parka Parkir	43,414,000				
2009	Pelatihan Juru Parkir	41,953,000	41,953,000	63,018,000	66.57	Cukup Efisien
2010	Pelatihan Juru Parkir	43,595,000	43,595,000	87,217,000	49.98	Efisien
2011	1. Honor Juru Parkir	150,000,000	151,050,000	401,612,000	37.61	Sangat Efisien
	2. Biaya Rapat parkir	1,050,000				



PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Solok No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi khusus Parkir dan Parkir Di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di tepi jalan umum.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Derah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1970) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang - undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - undang Nomor. 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2003 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 6);
18. Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

3

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok.
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih baik bermotor ataupun tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang semata mata dilengkapi dengan sebanyak – banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus dan mobil penumpang, sepeda motor dan kendaraan khusus.
12. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah – rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
13. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan diizinkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
16. Fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat yang dapat berupa taman parkir dan / atau gedung parkir.
17. Fasilitas parkir ditepi jalan adalah fasilitas parkir pada beberapa badan jalan tertentu yang ditetapkan sebagai tempat parkir.
18. Tempat parkir isidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap kegiatannya dari/atau dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
19. Usaha parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan yang berupa uang.
20. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat parkir.
21. Parkir berlangganan adalah pungutan parkir kendaraan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama retribusi Tempat Khusus Parkir dan parkir Di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan dan penyediaan tempat parkir yang meliputi :

- a. Parkir di tepi jalan umum
- b. Parkir gedung
- c. parkir pelataran pada bangunan umum

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir dan parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa usaha dan jasa umum.

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat parkir.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi Jalan Umum berdasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi Jalan Umum berdasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jangka waktu dan jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif/satu kali Parkir (Rp)
1.	Taman <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 3 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 	500 1.000 1.000 1.500
2.	Tempat Khusus Parkir (Pelataran) <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 3 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 	500 1.000 1.000 1.500
3.	Gedung <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 	1.000 2.000 3.000
4.	Tepi Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 3 - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 b. Kendaraan Tidak Bermotor <ul style="list-style-type: none"> - Bendi - Becak barang - Sepeda 	500 1.000 1.000 1.500 1.000

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan parkir diberikan

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan daerah ini.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dibenarkan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 17

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (3) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Pengaturan dan tata cara parkir berlangganan dan parkir insidentil akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

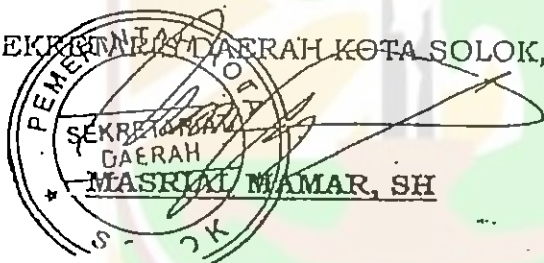
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal 29 Februari 2008



Diundangkan di : Solok
Pada tanggal 29 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 NOMOR..05

9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai penyeragaman pungutan jenis Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga pengaturan tentang retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi jalan umum yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002, tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada Wajib Retribusi dan lain-lainnya, kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakan samakan dengan Pihak Ketiga adalah

kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

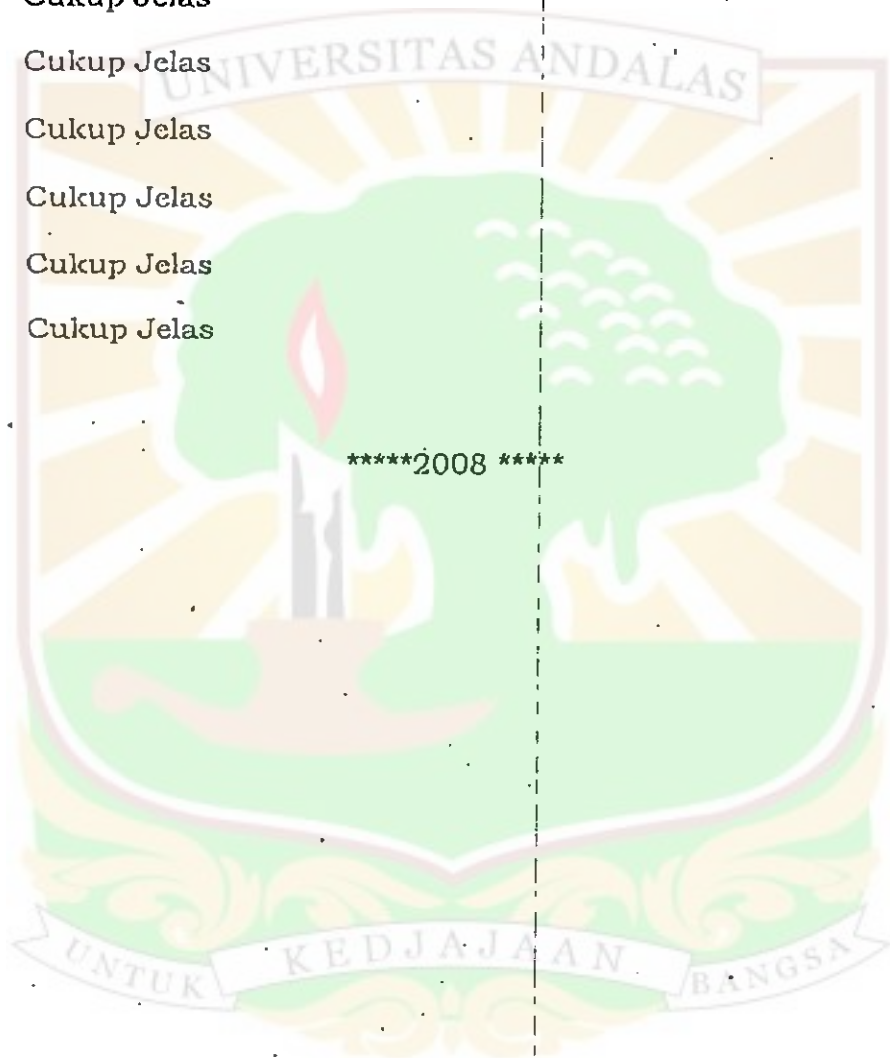
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

Jln. Sudirman No.13 Telp. 20144 - 20505 Solok 27324 Fax. No. 324456

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 188.45/3 .IKPTS/DPRD-2008

T E N T A N G
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN TERHADAP 7 (TUJUH) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

Membaca : Surat Walikota Solok Nomor : 180/447/HUK-2007
tanggal 30 November 2007, perihal Penyampaian
Rancangan 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah;

Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 menyatakan bahwa DPRD memiliki Fungsi
Legislasi, Anggaran dan Pengawasan sehubungan
dengan hal tersebut, Pembahasan 7 (tujuh) buah
Ranperda merupakan tugas pokok dan fungsi DPRD
dibidang legislasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, dan dirasa perlu menetapkan
dan mengesahkan 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan
Daerah Kota Solok, untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah dengan suatu keputusan DPRD Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1956, Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19),jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)
6. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

7. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
- 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 12 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132 tambahan Lembaran Negara Nomor .4444);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60 tambahan

Lembaran Negara Nomor 3528);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63 tambahan lembaran Negara Nomor 3691);
- 15 Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004, tentang pedoman penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD (

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2005;

20 Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165);

22 Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4337);

23 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

24 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman pengelolaan Perparkiran di daerah; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

- 25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KEU 71 tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 26 Keputusan Menteri perhubungan Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 27 Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 84 tahun 1999 tentang Angkutan Jalan Umum;
- 28 Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 29 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok tahun 2000 Nomor 5);
- 30 Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2001, tentang Pokok – pokok pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- 31 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2003, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok tahun 2003 Nomor 21);
- 32 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Solok sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006

(Lembaran Daerah Kota Solok tahun 2006 Nomor 14);

33 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok tahun 2006 Nomor 6);

34 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok tahun 2008;

35 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;

Memperhatikan : 1 Keputusan DPRD Kota Solok Nomor. 188.45/02/KPTS/DPRD/SLK-2005 tanggal 19 Januari 2005, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Solok

2 Hasil Keputusan Rapat Paripurna Pendapat akhir Fraksi DPRD Kota Solok, pada tanggal 29 Februari 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Solok tahun 2008;

Kedua : Penetapan dan Persetujuan terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok, sebagaimana tersebut diklum pertama keputusan ini adalah :

1. Perda tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok;

2. Perda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Solok
3. Perda tentang Pengelolaan Perparkiran;
4. Perda tentang Retribusi Tempal Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Perda tentang Retribusi WC/MCK
6. Perda tentang Retribusi Terminal;
7. Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada saudara Walikota Solok;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOLOK

PADA TANGGAL : 29 Pebruari 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SOLOK

Ketua


Drs. H. BURHANIS SYARIF

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :Yth

1. Bapak Gubernur Prop. Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Walikota Solok di Solok
3. Sdr. Unsur Muspida Kota Solok di Solok
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Solok di Solok
5. Sdr. Ka. Bawasda Kota Solok di Solok
6. Sdr. Ka. BPKD Kota Solok di Solok
7. Sdr. Kabag Pemerintahan



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

JL.Nasir Sutan Pamuncak No.67 Telp.(0755) 21013 Solok

Nomor : 551.2/ /DPKI-IV/2010

Solok, April 2010

Lamp : -

Perihal : Teguran III

Kepada :

YTH : Sdr. Almi Putra

Pengelola Parkir Toko Cemerlang

di-

Solok

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Teguran I dan II yang telah kami sampaikan, berdasarkan Naskah Kerjasama (Kontrak) Tahun 2009 Dengan Dishub Kominfo Kota Solok Sudah berakhir 31 Desember 2009. Maka dengan ini kami sampaikan pada Saudara nilai

kontrak Saudara untuk tahun 2009 Sebesar : Rp. 4.780.000,-

Sedangkan yang baru Saudara Setorkan : Rp. 1.246.000,-

Maka kekurangannya : Rp. 3.534.000,-

Untuk itu diminta Kepada Saudara untuk melunasinya paling Lambat tgl 09 April 2010, ke Kantor Dishub Kominfo Kota Solok.

Demikianlah Kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat di maklumi.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Drs. ARMENSES, MM

NIP-19620315 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Solok (laporan)
2. Bapak Wakil Walikota Solok (laporan)
3. Saudara Kepala DPPKA
4. Pertinggal

4/5-10

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunling) Fax. (0755) 21321

SOLOK

NOTA DINAS

Kepada : Yth, Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Nomor : 900/443/DPPKA/ 2010
Tanggal : 10 Mei 2010
Perihal : Tunggakan Pembayaran Kontrak Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun 2009

ISI

- Naskah Kerjasama Nomor : 974 / 96 / Dishubkominfo-2009 Tanggal 16 Februari 2009 Tentang Pengelolaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Solok Tahun 2009.

Permasalahan : 1. Tidak terealisasinya Retribusi Ditepi Jalan Umum Tahun 2009 disebabkan masih adanya tunggakan retribusi oleh pihak ketiga sebagai pengelola pemungutan retribusi ditepi jalan umum sebagai berikut :

No	Nama Pengelola	Lokasi Tempat Parkir	Nilai Kontrak	Realisasi Kontrak	Lebih / Kurang	
					Rp.	%
1.	Muharamidas	Depan Tk. Win Jaya	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	(25)
2.	Furgan	Depan TK. Listrik	8.500.000	3.700.000	(4.800.000)	(56)
3.	Zufni Akbar	Depan Solinda	6.500.000	4.100.000	(2.400.000)	(37)
4.	Almi Putra	Depan FC Cemerlang	4.780.000	1.246.000	(3.534.000)	(74)

2. Sampai dengan akhir Bulan Desember 2009 Target/Nilai Kontrak pengelolaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum tidak juga diselesaikan oleh pihak pengelola.

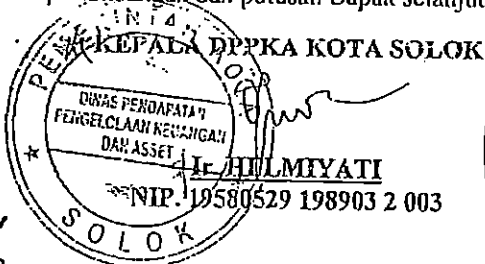
Pembahasan : 1. Dalam rangka merealisasikan penerimaan PAD dari retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2009, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok sebagai Inner Pengelola Retribusi telah melakukan tindakan persuasif yang dalam hal ini telah memberikan peringatan secara lisan beberapa kali dan telah memanggil yang bersangkutan terakhir dengan memberikan surat teguran I, II dan III
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pasal 9 tentang Sanksi disebutkan jika Pihak Kedua (Pengelola) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Kerjasama, maka Pihak Pertama (Pemerintah Daerah Cq. SKPD Pengelola) berhak untuk :
a. Memutuskan kontrak secara sepihak
b. Memperhitungkan kerugian-kerugian materi pihak pertama yang ditimbulkan dan dilakukan penagihan kepada Pihak Kedua.
c. Pengontrak selanjutnya ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

Simpulan : 1. Terhadap tunggakan retribusi parkir ditepi jalan umum perlu dilakukan penagihan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok.
2. Pengelola parkir sampai saat ini masih melakukan aktivitas di lokasi parkir dan ini akan membawa dampak negatif terhadap pengelola parkir yang lainnya.

Saran : 1. Sehubungan dengan permasalahan diatas bersama ini kami sarankan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Dalam rangka penegakkan peraturan dan peningkatan penerimaan daerah Kota Solok, sebaiknya Kontrak Pengelolaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Solok Tahun 2009 dapat diputuskan atau dihentikan dengan tetap melakukan penagihan tunggakan retribusi.
2. Dalam masa transisi pengambil alihan lokasi Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum sebaiknya dikelola langsung oleh inner atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

Demikian disampaikan, mohon pertimbangan dan putusan Bapak selanjutnya. Terimakasih.



4/5-10

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunfing) Fax. (0755) 21321

SOLOK

NOTA DINAS

ISI

- Naskah Kerjasama Nomor : 974 / 96 / Dishubkominfo-2009 Tanggal 16 Februari 2009 Tentang Pengelolaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Solok Tahun 2009.

1. Tidak terealisasinya Retribusi Ditepi Jalan Umum Tahun 2009 disebabkan masih adanya tunggakan retribusi oleh pihak ketiga sebagai pengelola pemungutan retribusi ditepi jalan umum sebagai berikut :

No	Nama Pengelola	Lokasi Tempat Parkir	Nilai Kontrak	Realisasi Kontrak	Lebih / Kurang	
					Rp.	%
1.	Muharamidas	Depan Tk. Win Jaya	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	(25)
2.	Furgan	Depan TK.Listrik	8.500.000	3.700.000	(4.800.000)	(56)
3.	Zufni Akbar	Depan Solinda	6.500.000	4.100.000	(2.400.000)	(37)
4.	Almi Putra	Depan FC Cemerlang	4.780.000	1.246.000	(3.534.000)	(74)

2. Sampai dengan akhir Bulan Desember 2009 Target/Nilai Kontrak pengelolaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum tidak juga diselesaikan oleh pihak

1. Dalam rangka merealisasikan penerimaan PAD dari retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2009, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok sebagai Inner Pengelola Retribusi telah melakukan tindakan persuasif yang dalam hal ini telah memberikan peringatan secara lisan beberapa kali dan telah memanggil yang bersangkutan terakhir dengan memberikan surat teguran I, II dan III
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pasal 9 tentang Sanksi disebutkan jika Pihak Kedua (Pengelola) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Kerjasama, maka Pihak Pertama (Pemerintah Daerah Cq. SKPD Pengelola) berhak untuk :
- Memutuskan kontrak secara sepihak
 - Memperhitungkan kerugian-kerugian materi pihak pertama yang ditimbulkan dan melakukan penagihan kepada Pihak Kedua.
 - Pengontrak selanjutnya ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

1. Terhadap tunggakan retribusi parkir ditepi jalan umum perlu dilakukan penagihan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok.
2. Pengelola parkir sampai saat ini masih melakukan aktivitas di lokasi parkir dan ini akan membawa dampak negatif terhadap pengelola parkir yang lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan diatas bersama ini kami sarankan kepada Bapak sebagai berikut :

- Dalam rangka penegakkan peraturan dan peningkatan penerimaan daerah Kota Solok, sebaiknya Kontrak Pengelolaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Solok Tahun 2009 dapat diputuskan atau dihentikan dengan tetap melakukan penagihan tunggakan retribusi.
- Dalam masa transisi pengambil alihan lokasi Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum sebaiknya dikelola langsung oleh inner atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

Demikian disampaikan, mohon pertimbangan dan putusan Bapak selanjutnya. Terimakasih.





15/4-10

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Nasir Pamuncak No. 67 Telp/Fax (0755) 21013 – 325796

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
 : Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok
Nomor : 551.21/DPKI/IV-2010
Tanggal : 13 April 2010
Perihal : Laporan Tunggakan Setoran Parkir ditepi Jalan Umum

ISI

Berdasarkan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir ditepi Jalan Umum untuk tahun 2009 telah berakhir pada 31 Desember 2009, Dari 10 (sepuluh) orang pengelola parkir yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama tahun 2009, masih terdapat 4 (empat) orang pengontrak yang belum melaksanakan kewajibannya / belum melunasi tunggakan setoran tahun 2009 sebagai berikut :

No	Nama Pengontrak	Lokasi	Jumlah Tunggakan
1.	Muharamidas	- Depan Toko Win Jaya	Rp. 3.000.000;-
2.	Furgan	- Depan Toko Listrik (samping bioskop karya)	Rp. 4.800.000;-
3.	Jukhni Akbar	- Depan Solinda	Rp. 2.400.000;-
4.	Almi Putra	- Depan Foto Copy Cemerlang	Rp. 3.534.000;-

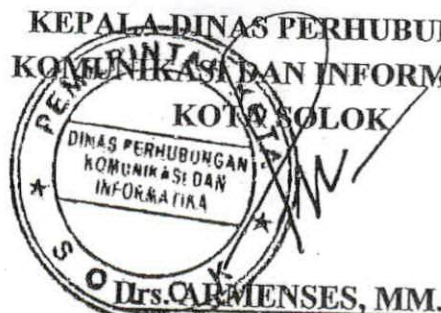
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah memberikan beberapa kali peringatan kepada yang bersangkutan untuk melunasi tunggakan parkir tahun 2009, terakhir dengan memberikan Surat Teguran I, II dan III akan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Berhubung tahun 2010 telah berjalan selama 3 (tiga) bulan, untuk kelancaran penerimaan PAD dari Retibusi Parkir, kami menyarankan terhadap pengontrak lama yang telah melunasi semua kewajiban tahun 2009 dapat terus melanjutkan Kontrak tahun 2010 sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBD 2010.

Sementara terhadap pengontrak yang sampai saat ini masih belum melunasi kewajiban / mempunyai tunggakan pada tahun 2009, karena sampai saat ini tidak adanya itikhad baik dari yang bersangkutan untuk itu disarankan agar lokasi parkir tersebut untuk sementara waktu diambil alih dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok sampai yang bersangkutan melunasi semua tunggakan yang ada.

Demikianlah Nota Dinas ini kami sampaikan kepada Bapak mohon arahan dan persetujuan Bapak lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NIP : 19620515 198602 1 003